

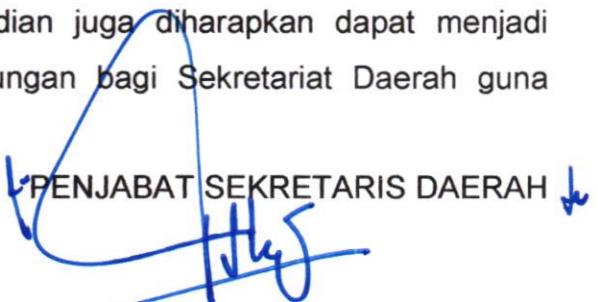
## KATA PENGANTAR

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, maka Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, yang mana Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Sekretariat Daerah ini juga dibangun dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan struktur pemerintah yang bersih melalui transparansi, pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, dan khususnya dalam mewujudkan *Good Governance* dalam penyelenggaran pemerintahan daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau ini dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terukur terhadap kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Kemudian juga diharapkan dapat menjadi sarana untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Sekretariat Daerah guna meningkatkan kinerja kedepannya.

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  


Drs. Eko Sumbaryadi  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631117 199103 1 013

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

Hasil analisa atas pelaksanaan kinerja tahun 2021 pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepri secara umum dinyatakan “baik”. Dari 16 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur 14 sasaran, didapati sebanyak 2 indikator dinyatakan “sangat baik”, 10 indikator dinyatakan “baik”, 3 indikator dinyatakan “cukup baik” dan 1 indikator dinyatakan “kurang baik”.

Pencapaian ini jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020, maka pada tahun 2021 terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini tampak pada rata-rata capaian pada tahun 2021 sebesar 104,76% dan rata-rata capaian pada tahun 2020 sebesar 124,85%, hal ini disebabkan oleh adanya 3 indikator yang penilaianya Cukup Baik (Skor rata-rata tingkat Kesehatan BUMD, Peringkat LPPD Provinsi, Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah), dan 1 indikator bernilai Kurang Baik (Persentase Santri yang menjadi hafiz). Adapun Langkah - langkah yang akan ditempuh pada masa mendatang yaitu :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan OPD penyusun LPPD;
2. Pemenuhan Modal, Penyelesaian Hutang BUMD dan Melakukan pemilihan pengurus BUMD secara Profesional;
3. Merubah konsep kegiatan agar indikator tercapai dengan penilaian dapat sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2021, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan serapan anggaran sebesar 92,64%. Realisasi anggaran tersebut jika dibandingkan dengan rata-rata capaian sasaran sebesar 104,76% maka menunjukkan adanya efektivitas kinerja terhadap penggunaan anggaran.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	ii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	iii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
A. Umum1	
B. Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....	2
C. Isu Strategis Organisasi.....	5
D. Sistematika Penyajian .....	6
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	7
A. Rencana Strategis .....	7
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	8
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	19
A. Capaian Kinerja Tahun 2021 .....	19
1. Meningkatnya Capaian Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN .....	23
2. Meningkatnya Rekomendasi Bidang Ekonomi yang Ditindaklanjuti .....	29
3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD .....	32
4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang Akuntabel .....	36
5. Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukur .....	43
6. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau .....	57
7. Indeks Kepuasan Masyarakat .....	61
8. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan .....	67
9. Tersedianya Produk Hukum Provinsi yang Tidak Tumpang Tindih .....	72

10. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	81
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah .....	83
12. Sasaran Terkelola dan Terpeliharanya Aset Milik Sekretariat Daerah Secara Tertib dan Transparan .....	85
13. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan.....	89
14. Meningkatnya Akses Pelayanan Umum dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan .....	94
B. Realisasi Anggaran.....	98
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>108</b>
A. Kesimpulan.....	108
B. Strategi Peningkatan Kinerja .....	109
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>
LAMPIRAN A PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 .....	111
LAMPIRAN B PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 .....	114
LAMPIRAN C INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 .....	117
LAMPIRAN D CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 .....	124
LAMPIRAN E TINGKAT EFEKTIVITAS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021 .....	127

## DAFTAR TABEL

Tabel II. 1	Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	9
Tabel II. 2	Program dan Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	12
Tabel II. 3	Anggaran pada Sasaran Strategis Tahun 2021.....	13
Tabel II. 4	Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau .....	14
Tabel III. 1	Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	20
Tabel III. 2	Realisasi Program/Sasaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	99
Tabel III. 3	Tingkat Efisiensi.....	103
Tabel III. 1 - 1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN .....	23
Tabel III. 1 - 2	Laporan Pagu dan Realisasi Dekosentrasi Tahun 2021 .....	26
Tabel III. 1 - 3	Laporan Pagu dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021 .....	28
Tabel III. 1 - 4	Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target.....	29
Tabel III. 2 - 1	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Kebijakan Dan Rekomendasi Bidang Perekonomian yang Dihasilkan.....	29
Tabel III. 2 - 2	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang di hasilkan Tahun 2021 Sasaran Strategis 1 .....	30
Tabel III. 2 - 3	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perkonomian yang Dihasilkan .....	31

Tabel III. 3 - 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD Tahun 2021 .....	32
Tabel III. 3 - 2 Klasifikasi Tingkat Kesehatan BUMD .....	33
Tabel III. 3 - 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Skor Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD .....	35
Tabel III. 4 - 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Penyelenggaraan..	36
Tabel III. 4 - 2 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Peringkat LPPD Provinsi .....	41
Tabel III. 4 - 3 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah .....	42
Tabel III. 5 - 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukur Tahun 2021 .....	43
Tabel III. 5 - 2 Daftar Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau.....	46
Tabel III. 5 - 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Dinas .....	53
Tabel III. 5 - 4 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Perangkat Daerah yang telah Tepat Fungsi dan Tepat Ukur Kelembagaannya.....	56
Tabel III. 6 - 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	57
Tabel III. 6 - 2Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kepri Tahun 2020 .....	58
Tabel III. 6 - 3 Kategori dari Penilaian Reformasi Birokrasi.....	59
Tabel III. 6 - 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Nilai/Indeks Reformasi Birokrasi.....	60

Tabel III. 7 - 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 .....	61
Tabel III. 7 - 2 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 .....	64
Tabel III. 7 - 3 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	65
Tabel III. 7 - 4 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik OPD di Prov. Kepri.....	66
 Tabel III. 8 - 1 Capaian Kinerja Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan.....	67
Tabel III. 8 - 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Realisasi Pengadaan Proyek di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.....	71
 Tabel III. 9 - 1 Capaian Kinerja Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya Produk Hukum Provinsi Yang Tidak Tumpang Tindih.....	73
Tabel III. 9 - 2 Perda Perkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021.....	74
Tabel III. 9 - 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang Dilakukan Evaluasi dan Dilakukan Penyempurnaan Sehingga Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kepentingan Umum dan atau Kesusilaan .....	80
 Tabel III. 10 – 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	81
Tabel III. 10 - 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai SOP .....	83

Tabel III. 11 - 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah.....	83
Tabel III. 11 - 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah .....	86
Tabel III. 12 - 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terkelola dan Terpeliharanya Aset Milik Sekretariat Daerah Secara Tertib dan Transparan .....	85
Tabel III. 12 - 2 Capaian Kinerja Indikator Persentase Aset Milik Sekretariat Daerah yang Terjamin Keamanannya .....	87
Tabel III. 12 - 3 Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Aset Milik Sekretariat Daerah yang Terjamin Keamanannya.....	88
Tabel III. 13 - 1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan .....	89
Tabel III. 13 - 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Mubaligh yang tersertifikasi .....	90
Tabel III. 13 - 3 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Santri yang Menjadi Hafiz .....	92
Tabel III. 14 - 1 Capaian Kinerja Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pelayanan Umum dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan .....	94
Tabel III. 14 - 2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Media Massa yang menyiar kegiatan Pemprov. Kepri Dalam Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .....	97

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar I. 1	STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	4
Gambar III. 4 - 1	Grafik Peringkat LPPD Provinsi Kepri .....	38
Gambar III. 13 - 1	Capaian Mubaligh yang Tersertifikasi.....	91
Gambar III. 13 - 2	Persentase Santri yang Menjadi Hafiz .....	93
Gambar III. 14 - 1	Pencapaian Kinerja Tahun 2019-2021 .....	95
Gambar III. 14 - 2	Jenis Media Massa yang Berkerjasama dengan Biro Humas, Protokol dan Penghubung Tahun 2019-2021 .....	96
Gambar III. 14 – 3	Jumlah Media Massa yang Berkerjasama dengan Biro Humas, Protokol dan Penghubung Tahun 2019-2021 .....	96
Gambar III. 14 - 4	Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran .....	97

## **BA B I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Umum**

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan bahwa Pimpinan masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja pada Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pencapaian Kinerja sesuai dengan lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan untuk masing-masing Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga dan SKPD.

Perjanjian kinerja sendiri dimaknai sebagai lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Selanjutnya melalui perjanjian kinerja ini, akan melahirkan komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan perjanjian kinerja ini akan diiringi dengan pertanggungjawaban berupa penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pelaksanaan perjanjian kinerja dan laporan pertanggungjawabannya merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan sebagai media pengukuran keberhasilan maupun kegagalan dari instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, dan diharapkan pula dapat menampilkan transparansi dan obyektifitas pada pelaksanaan kerja suatu instansi.

Terkadang sudah menjadi pemahaman umum bahwa pengukuran kinerja suatu instansi pemerintah hanya lebih ditekankan kepada kemampuan instansi tersebut dalam menyerap anggaran. Suatu instansi dikatakan berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsinya apabila dapat menyerap seratus persen anggaran pemerintah, walaupun hasil maupun dampak dari pelaksanaan program tersebut masih jauh di bawah standar.

Untuk itu agar dapat mengetahui tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah secara objektif, maka seluruh aktivitas instansi tersebut harus dapat diukur, dan pengukuran tersebut tidak semata-mata kepada masukan dari program akan tetapi lebih ditekankan kepada keluaran, proses, manfaat dan dampak dari pelaksanaan kerja yang telah dilakukan. Dengan dilakukannya aktivitas pengukuran kinerja ini maka dapat terwujud akuntabilitas pada instansi sehingga mendorong terciptanya *Good Governance* pada level instansi dan pada akhirnya bermuara pada tingkat daerah *Good Local Governance* di Provinsi Kepulauan Riau.

## B. Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Tipe Sekretariat Daerah yang dibentuk di Provinsi Kepulauan Riau adalah Sekretariat Daerah Tipe A, yang mana Sekretariat Daerah ini merupakan unsur staf dan mempunyai tugas membantu gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut, dalam Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah turut dijabarkan bahwa Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi:

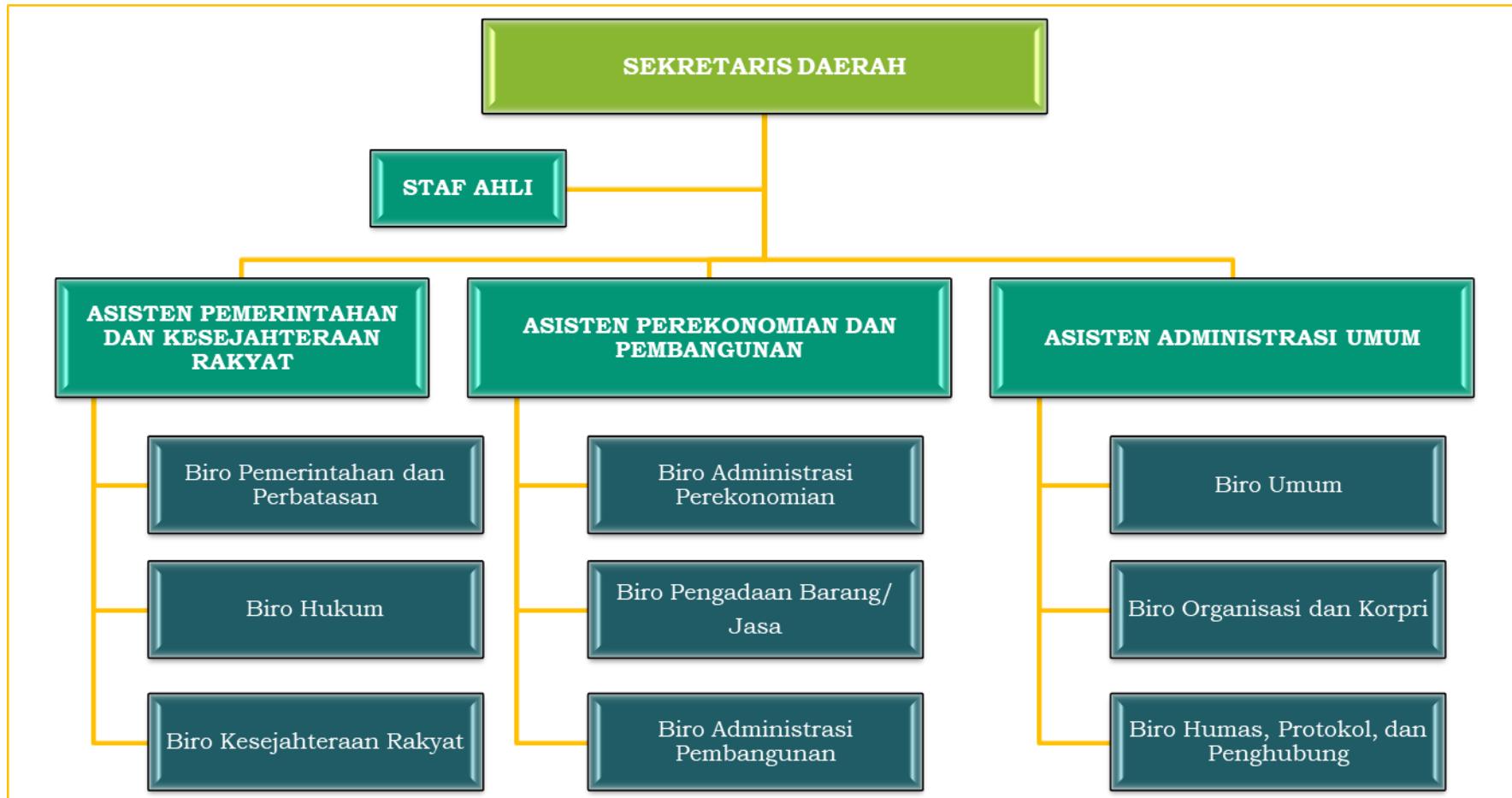
1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi tersebut ditetapkan pula Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan susunan organisasi yang terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah
2. Staf Ahli
  - ✓ Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum;
  - ✓ Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
  - ✓ Staf Ahli Bidang Sosial, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
3. Asisten Sekretaris Daerah
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri atas:
    - ✓ Biro Pemerintahan dan Perbatasan;
    - ✓ Biro Hukum; dan
    - ✓ Biro Kesejahteraan Rakyat.
  - b. Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan terdiri atas:
    - ✓ Biro Administrasi Perekonomian;
    - ✓ Biro Administrasi Layanan Pengadaan; dan
    - ✓ Biro Administrasi Pembangunan.
  - c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
    - ✓ Biro Umum;
    - ✓ Biro Organisasi dan Korpri; dan
    - ✓ Biro Humas, Protokol dan Penghubung.

Struktur organisasi tersebut sebagaimana gambar di bawah ini:

**Gambar I. 1**  
**STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



### C. Isu Strategis Organisasi

Beberapa isu dan masalah pembangunan yang dihadapi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 sebagaimana telah dimuat dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 antara lain:

1. Masih mewabahnya penyebaran *Covid-19* di seluruh wilayah di Indonesia menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi tidak optimal;
2. Pemulihan ekonomi Nasional melalui pencegahan penyebaran *Covid-19* masih menjadi isu utama pembangunan di Tahun 2021.
3. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi terbatas dan hanya dimungkinkan melalui daring/*virtual meeting*;
4. Penerapan situasi *new normal* atau tatanan normal baru sesuai protokol kesehatan pencegahan *Covid-19* membutuhkan waktu yang lama dan kesadaran penuh seluruh aparatur dan masyarakat dalam penerapannya;
5. Pelaksanaan *work from home* (kerja dari rumah) dimungkinkan dilaksanakan kembali apabila terjadi penyebaran *Covid-19* yang lebih luas;
6. Penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah belum optimal;
7. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
8. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efisien dan efektif;
9. Belum optimalnya seluruh rangkaian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa;
10. Masih rendahnya pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, dalam mendukung visi dan misi Daerah;
11. Pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap biro belum optimal;
12. Masih terdapat beberapa biro yang belum tepat fungsi dan tepat ukur;
13. Penyiapan produk hukum daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan diatasnya dan memperhatikan kebutuhan masyarakat belum optimal

14. Sistem perencanaan, penganggaran dan sistem akuntabilitas kinerja belum terintegrasi secara sinergi;
15. Kompetensi sumber daya aparatur yang masih rendah dan distribusi sumber daya aparatur yang belum merata;
16. Belum optimalnya koordinasi antar biro, sehingga pelaksanaan tugas antar biro kurang sinergis dan tidak terkoordinir dengan baik;
17. Sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.

## **D. Sistematika Penyajian**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah dengan sistematika sebagai berikut:

### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis organisasi, dan sistematika penyajian.

### **Bab II Perencanaan Kinerja**

Bab ini menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepri Tahun 2021.

### **Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Bab ini menjelaskan analisis pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dikaitkan dengan pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021 serta realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

### **Bab IV Penutup**

Bab ini berisi kesimpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepri dan langkah yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

Sebagai pedoman perencanaan pembangunan pada perangkat daerah, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai dokumen turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah.

Untuk periode lima tahunan pada tahun 2016-2021, Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021. Dalam Renstra tersebut, disebutkan Visi Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021 yakni:

**“Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”**

Guna mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 9 misi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021. Dari visi dan misi tersebut, secara umum tujuan yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berpedoman kepada 2 (dua) Misi yaitu Misi ke-1 dan Misi ke-9 Gubernur Kepulauan Riau yaitu:

Misi ke – 1 (Satu) yaitu: “Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu”.

Misi ke – 9 (Sembilan) yaitu: “Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas”.

Adapun tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam mencapai misi diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN
2. Mewujudkan Optimalisasi Perekonomian Daerah Indikator Tujuan: Persentase BUMD yang sehat
3. Mewujudkan Administrasi Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang optimal
4. Mewujudkan kelembagaan pemerintahan dan manajemen SDM aparatur Provinsi Kepulauan Riau yang efektif dan efisien
5. Meningkatkan Efektifitas, Efisiensi, transparansi, keterbukaan, kompetisi, keadilan serta akuntabilitas dari seluruh rangkaian pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah
6. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Produk Hukum, Pelayanan, Informasi dan Bantuan Hukum kepada Masyarakat perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesesuaian sebanyak 34 Produk Hukum
7. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Administrasi Umum
8. Meningkatkan pembinaan terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat
9. Meningkatkan tata hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang harmonis dan sinergis.

## B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 merupakan perjanjian kinerja tahun kelima dari Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau periode 2016-2021 yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) yang terkait dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah Sasaran Strategis tahun 2021 sebanyak 14 Sasaran dengan 16 indikator kinerja. Jumlah sasaran dan indikator tersebut sama banyaknya dengan

jumlah sasaran dan indikator tahun 2020. Perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran.

Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 dilakukan perubahan setelah penetapan APBD Perubahan Provinsi Kepulauan Riau pada 27 November 2021 dikarenakan adanya perubahan anggaran yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021. Berikut adalah sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2021 berdasarkan perjanjian kinerja perubahan tahun 2021.

**Tabel II. 1**  
**Perjanjian Kinerja Perubahan**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Fisik 100%, Keuangan 95%	Biro Administrasi Pembangunan
2	Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	8	Biro Administrasi Perekonomian
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Skor rata – rata tingkat kesehatan BUMD	45	Biro Administrasi Perekonomian
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	Peringkat LPPD Provinsi  Percentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tinggi  100%	Biro Pemerintahan dan Perbatasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
5	Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	100%	Biro Organisasi dan Korpri
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau	Nilai /Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	75	Biro Organisasi dan Korpri
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	B	Biro Organisasi dan Korpri
8	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	87%	Biro Pengadaan Barang/ Jasa
9	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan	7	Biro Hukum

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
		sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan		
10	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	100%	Biro Umum
11	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	100%	Biro Umum
12	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	100%	Biro Umum
13	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	100%	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase santri yang menjadi hafiz	100%	
14	Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan	Persentase media massa yang menyiarkan kegiatan Pemerintah Provinsi	100%	Biro Humas, Protokol, dan Penghubung

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5
	pemerintahan	Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah		

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam perjanjian kinerja perubahan Tahun 2021, sesuai Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021, Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 didukung oleh anggaran APBD sebesar Rp710.641.461.309,00 yang digunakan untuk melaksanakan 84 Kegiatan dan 237 Sub Kegiatan yang terangkum dalam 12 Program dengan alokasi anggaran sebagai berikut:

**Tabel II. 2**  
Program dan Anggaran pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2021

No.	Program	Anggaran	Ket.
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp249.363.019.995	P-APBD
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp1.382.658.800	P-APBD
3	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp1.852.881.600	P-APBD
4	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp690.221.150	P-APBD
5	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp547.022.250	P-APBD
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp969.452.350	P-APBD
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp3.743.706.800	P-APBD

8	Program Pelayanan Penghubung	Rp1.773.456.592	P-APBD
9	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp448.375.134.772	P-APBD
10	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp777.543.000	P-APBD
11	Program Penataan Organisasi	Rp1.033.671.500	P-APBD
12	Program Kepegawaian Daerah	Rp132.692.500	P-APBD
<b>Jumlah</b>		<b>Rp710.641.461.309</b>	

Selanjutnya anggaran tersebut digunakan untuk mendukung terwujudnya Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 dengan alokasi sebagai berikut:

**Tabel II. 3**  
Anggaran pada Sasaran Strategis Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
1	Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN	1.382.658.800
2	Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	573.264.500
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	396.187.850
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	1.077.549.900
5	Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur	52.352.900
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau	384.620.100
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	244.155.200
8	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan	777.543.000
9	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	3.743.706.800

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
10	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	11.318.132.550
11	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	132.601.421.393
12	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	24.042.660.232
13	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	448.375.134.772
14	Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	53.521.964.986
<b>Jumlah</b>		<b>678.491.352.983</b>

#### Indikator Kinerja Utama (IKU)

Sembilan Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau bertanggung jawab terhadap masing-masing indikator kinerja utama dalam perjanjian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021 digunakan sebagai cara mengukur capaian kinerja. Indikator Kinerja Utama tersebut sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel II. 4**

#### Indikator Kinerja Utama

Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	%	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan dibagi Persentase Target Fisik dan Keuangan dikali 100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Rekomendasi Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Rekomenda-si	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Skor rata- rata tingkat kesehatan BUMD	Skor	Jumlah BUMD yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dinyatakan sehat dibagi Total Jumlah BUMD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah yang akuntabel	Peringkat LPPD provinsi	Pering-kat	Peringkat LPPD Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
		Persentase penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah	%	Realisasi Skor PPD dibagi Target Skor PPD dikali 100
5	Terwujudnya organisasi pemerintah Provinsi Kepri yang tepat fungsi dan tepat ukur	Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur	%	Jumlah OPD yang Tertata Kelembagaannya dibagi Jumlah Total OPD dikali 100

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5
		kelembagaannya		
6	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Provinsi Kepulauan Riau	Nilai/ Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB	Nilai/ Indeks	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik organisasi perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau	Indeks	Nilai/Indeks Kepuasan Masyarakat
8	Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai prinsip-prinsip pengadaan	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	Jumlah paket proyek strategis yang dilaksanakan pengadaan barang/jasa nya tepat waktu dibagi jumlah total paket proyek strategis dikali 100
9	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpeng tindih	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan	Dokumen	Jumlah Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5
		penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan		bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan
10	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	%	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang sesuai dengan SOP dibagi Total kegiatan KDH/WKDH yang sesuai dengan SOP dikali 100
11	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	%	Jumlah SOP pelayanan umum yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah SOP pelayanan umum yang ada dikali 100
12	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	%	Jumlah aset di Sekretariat Daerah yang dikelola dan dipelihara dibagi jumlah total asset di

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan
1	2	3	4	5
				Sekretariat Daerah dikali 100
13	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase mualigh yang tersertifikasi	%	Jumlah mualigh yang lulus kompetensi dibagi mualigh yang dibina dikali 100
		Persentase santri yang menjadi hafiz	%	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di Kepulauan Riau dikali 100
14	Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase media massa yang menyiarkan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	%	Jumlah media yang menyiarkan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibagi Jumlah media yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikali 100

Sumber: Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor: 510/KPTS-1.6/I/2018

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Pengukuran tingkat capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 memuat hasil pengukuran kinerja yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Target}) \times 100 \%$$

Nilai capaian indikator kinerja dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

$X > 100\%$	: Sangat Baik
$75\% < X < 100\%$	: Baik
$55\% < X < 75\%$	: Cukup Baik
$X < 55\%$	: Kurang Baik

Ket. : X = Capaian indikator kinerja

#### **A. Capaian Kinerja Tahun 2021**

Pada tahun sebelumnya, tahun 2020, secara keseluruhan capaian sasaran strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menunjukkan peningkatan kinerja, meskipun terdapat indikator yang tidak mencapai target yang diharapkan, yang mana hal tersebut disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat sebagai akibat kondisi pandemic Covid-19 yang semakin memburuk. Namun secara umum capaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 secara keseluruhan dinyatakan "Sangat Berhasil" karena capaian rata-ratanya 124,85% melebihi target meskipun terdapat indikator yang hanya dapat mencapai kategori "Kurang Berhasil". Indikator yang capaiannya kurang berhasil adalah persentase santri yang menjadi hafiz.

Sedangkan untuk tahun 2021 ini, terdapat 16 indikator kinerja dari 14 Sasaran yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan pengukuran indikator maka didapat sejumlah indikator yang dapat dinyatakan sangat baik, cukup baik dan kurang baik.

Dari hasil perhitungan tersebut terdapat 2 indikator dinyatakan “sangat baik”, 10 indikator dinyatakan “baik”, 3 indikator dinyatakan “cukup baik”, dan 1 indikator “kurang baik”. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 1**

Realisasi Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	3	4	5	6	
<b>Sasaran Strategis 1:</b>					
Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN					
1	Percentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Fisik 100%	Fisik 100%	Fisik 100	
		Keuangan 95%	Keuangan 86.24%	Keuangan 90.77	
<b>Sasaran Strategis 2:</b>					
Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti					
1	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	8	8	100	
<b>Sasaran Strategis 3:</b>					
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD					
1	Skor rata – rata tingkat kesehatan BUMD	45	33,33	74,07	
<b>Sasaran Strategis 4:</b>					
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel					
1	Peringkat LPPD Provinsi	Tinggi (skor 3,000)	Rendah (skor 1,9713)*	65,71	

2	Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100%	65,71%	65,71
<b>Sasaran Strategis 5:</b>				
Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur				
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	100% (31 PD dari 31 PD)	100% (31 PD dari 31 PD)	100
<b>Sasaran Strategis 6:</b>				
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau				
1	Nilai /Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	75 (Kategori BB)	68,57 (Kategori B)	91,42%
<b>Sasaran Strategis 7:</b>				
Indeks Kepuasan Masyarakat				
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepri	B	B	100
<b>Sasaran Strategis 8:</b>				
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan				
1	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	87,00%	92,28%	106,07

<b>Sasaran Strategis 9:</b>				
Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih				
1	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	7	19	271,42
<b>Sasaran Strategis 10:</b>				
Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
1	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	100%	100%	100
<b>Sasaran Strategis 11:</b>				
Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah				
1	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	100%	100%	100
<b>Sasaran Strategis 12:</b>				
Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan				
1	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	100%	100%	100
<b>Sasaran Strategis 13:</b>				
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan				
1	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	100% (600 orang)	100%	100
2	Persentase santri yang menjadi hafiz	100% (5000 orang)	25% (1.250 orang)	25

<b>Sasaran Strategis 14:</b>				
Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan				
1	Persentase media massa yang menyiarkan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	100%	100

Ket:

- |                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <span style="background-color: #00AEEF; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> | Sangat Baik |
| <span style="background-color: #FFFFCC; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> | Baik        |
| <span style="background-color: #C8A28E; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> | Cukup Baik  |
| <span style="background-color: #C00000; width: 15px; height: 15px; display: inline-block;"></span> | Kurang Baik |

Capaian dari sasaran-sasaran strategis di atas dapat dijabarkan pada penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Meningkatnya Capaian Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN

**Tabel III. 1 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN

<b>Sasaran Strategis 1</b>				
Meningkatnya Capaian Penyerapan Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN				
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Fisik 100%	Fisik 100%	Fisik 100
		Keuangan n 95%	Keuangan 86.24%	Keuangan 90.77
<b>Capaian</b>				<b>95,385</b>

## **Persentase Realisasi Keuangan dan Fisik Kegiatan APBD dan APBN Sesuai Target**

Capaian Keuangan dan Fisik diperoleh dengan cara membagi antara Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan dengan Persentase Target Fisik dan Keuangan dikali 100. Realisasi indikator kinerja Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN yaitu realisasi fisik 100% dan keuangan 86.24% dari target fisik sebesar 100% dan keuangan 95%. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran meningkat dan Capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “**baik.**”

### **a. APBD**

#### **KEGIATAN APBD (NON DAK)**

Kegiatan pembangunan melalui belanja barang/jasa yang dilaksanakan APBD Provinsi Kepulauan Riau TA. 2021 yang belum selesai sampai dengan batas waktu kontrak antara lain:

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana di Kejaksaan Negeri Tanjungpinang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, tindak lanjut Sanksi denda keterlambatan 50 Hari Kalender
2. Belanja Pengadaan dan pemasangan Dermaga Apung HDPE Revitalisasi Dermaga Apung Pulau Penyengat pada Dinas Perhubungan.
3. Belanja Pengadaan dan pemasangan Dermaga Apung HDPE Revitalisasi Dermaga Apung Tanjung Uban Dinas Perhubungan
4. Paket Pekerjaan Hibah Bangunan Rusun Keluarga 4 Lantai Type 46 di Mako Satbrimob Polda Kepri pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
5. Paket Pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Polres Kota Tanjungpinang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
6. Paket Pekerjaan Pembangunan Penyediaan Air Bersih di Senggarang (KOREM) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7. Kapal Angkut Ikan Hidup Hasi Budidaya Bahan Kayu Lapis Fiber (15 Gt) pada Dinas Kelautan dan Perikanan.

## **DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)**

1. DAK Reguler Bidang Pendidikan Sub Bidang Pembinaan SMK terdapat 1 kegiatan Pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) beserta perabotnya di SMKN 4 Batam, pekerjaan tidak dapat diselesaikan dan putus kontrak pada tanggal 18 Desember 2021 dikarenakan kelalaian pihak kontraktor.
2. Pembangunan Jembatan Spesifikasi : Penggantian Jembatan 1 dan Jembatan 2 pada ruas jalan SP. Letung - Bandara Kabupaten Kepulauan Anambas, Paket Fisik dan Pengawasan Jembatan 1 dan Jembatan 2 pada ruas jalan SP. Letung - Bandara Masih Berjalan (progres 97,75%) dikarenakan terlambatnya pengiriman steel girder jembatan karena cuaca ekstrim, perkiraan pekerjaan selesai minggu pertama bulan Januari.

## **b. APBN**

Realisasi fisik kegiatan APBN T.A. 2021 meningkat dari Tahun 2020.

- 1) Tahun 2021 Pemerintah Provinsi mengelola dana APBN sebesar Rp59.915.660.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.475.351.285,00 (95,93%) dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 2) Besar pagu dana Dekosentrasi yang dikelola sebesar Rp32.352.934.000,00 dengan realisasi Rp31.106.111.942,00 (96,15%) dan realisasi fisik 100%.
- 3) Dana tugas Pembantuan tahun 2021 yang dikelola sebesar Rp27.562.726.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar Rp27.043.065.043,00 (98,11%) dan realisasi fisik sebesar 100%.

## **DEKONSENTRASI**

Realisasi keuangan kegiatan Dekonsentrasi tidak mencapai 100% dikarenakan 1 (satu) satker pengelola yakni Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi tidak optimal merealisasikan belanja barang/jasa. Beberapa penyebab tidak tercapainya realisasi fisik dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pagu yang dikelola Rp2,691,431,000,00, realisasi keuangan Rp2,068,644,000,00 (76,86%) dan realisasi fisik 100% dikarenakan kurang optimalnya penyerapan anggaran.

**Tabel III. 1 - 2**  
 Laporan Pagu dan Realisasi Dekonsentrasi Tahun 2021

No.	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK	KET
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	BARENLTBANG PROVINSI KEPULAUAN RIAU	655,476,000	626.907.729	95,64%	100.00%	
2	INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU	137,000,000	133.684.370	97,58%	100.00%	
3	DINAS KOPERASI DAN UKM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,885,234,000	1.876.558.700	99,54%	100.00%	
4	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,665,987,000	1.626.594.000	97,64%	100.00%	
5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA PROVINSI KEPULAUAN RIAU	1,453,830,000	1.441.997.430	99,19%	100.00%	
6	DINAS KESEHATAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	9,790,117,000	9.574.763.311	97,80%	100.00%	
7	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN	5,989,436,000	5.805.627.580	96,93%	100.00%	
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, DUKCAPIL	925,784,000	925.594.500	99,98%	100.00%	

9	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	427,734,000	413.232.581	96,61%	100.00%	
10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI KEPRI	2,124,096,000	2.072.274.312	97,56%	100.00%	
11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	491,946,000	483.487.383	98,28%	100.00%	
12	DINAS SOSIAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU	3,562,988,000	3.514.900.500	98,65%	100.00%	
13	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KEPRI	2,691,431,000	2.068.644.000	76,86%	100.00%	
14	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU	551,875,000	541.845.546	98,18%	100.00%	
	<b>TOTAL</b>	<b>2,352,934,000</b>	<b>31.106.111.942</b>	<b>96.15%</b>	<b>100.00%</b>	

Sumber : Realisasi keuangan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepri, Realisasi fisik oleh Satker Pengelola

## **TUGAS PEMBANTUAN**

Satker-satker pengelola Tugas Pembantuan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan PR dan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri dengan total dana yang dikelola sebesar Rp27.562.726.000,00 dengan realisasi keuangan Rp27.043.065.043,00 (98,11%) dan realisasi fisik 100%.

- 1) Dinas Pekerjaan Umum mengelola dana sebesar Rp19.919.868.000,00 dan realisasi anggaran Rp19.917.018.973,00 (99,99%), realisasi fisik 100%.
- 2) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri mengelola pagu sebesar Rp7.642.858.000,00, realisasi anggaran Rp7.126.046.070,00 (93,24%) dan realisasi fisik 100%.

**Tabel III. 1 - 3**

Laporan Pagu dan Realisasi Tugas Pembantuan Tahun 2021

NO	NAMA SATKER	PAGU	REALISASI		FISIK (%)
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
1	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	7,642,858,000	7,102,493,670	92.93%	100.00%
2	DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU	19,919,868,000	19,917,018,973	99.99%	100.00%
<b>TOTAL</b>		<b>27,562,726,000</b>	<b>27,019,512,643</b>	<b>98.03%</b>	<b>100.00%</b>

Sumber : Realisasi keuangan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri

Realisasi fisik oleh Satker Pengelola

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut :

**Tabel III. 1 - 4**

Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja  
Persentase Realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target

Tahun 2020				Tahun 2021			
Target	Realisasi	Capaian (%)		Target	Realisasi	Capaian (%)	
Fisik 100%	Fisik 99.35%,	Fisik 99.35	100,98	Fisik 100%	Fisik 100%	Fisik 100	95,39
Keuangan 95%	Keuangan 97.48%	Keuangan 102.61		Keuangan 95%	Keuangan 86.24%	Keuangan 90.77%	

Persentase Capaian tahun 2021 lebih rendah jika dibandingkan dengan Persentase Capaian tahun 2020 dikarenakan oleh kurangnya serapan keuangan pada kegiatan di tahun anggaran 2021, ini juga dipengaruhi oleh kondisi pandemi sehingga terdapat anggaran yang harus di *refocussing*, namun demikian persentase capaian fisik mencapai 100% dan persentase penilaian capaian tahun 2021 masuk pada kategori “**BAIK**”. Langkah kedepannya dibutuhkan perencanaan yang lebih matang dalam penganggaran kegiatan, agar capaian keuangan dapat terserap lebih baik lagi.

## 2. Meningkatnya Rekomendasi Bidang Ekonomi yang Ditindaklanjuti

**Tabel III. 2 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya perekonomian daerah melalui kebijakan dan rekomendasi bidang perekonomian yang dihasilkan

Sasaran Strategis 2				
Meningkatnya Perekonomian Daerah Melalui Kebijakan dan Rekomendasi Bidang Perekonomian Yang Dihasilkan				
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Jumlah Rekomendasi kebijakan dibidang perkonomian yang dihasilkan	8	8	100

### **Jumlah Rekomendasi kebijakan dibidang perkonomian yang dihasilkan**

Berdasarkan tabel di atas Persentase Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan merupakan indikator utama untuk mengukur apakah Pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan sudah sesuai dengan Renstra yang telah ditetapkan. Indikator ini menilai jumlah Rekomendasi Kebijakan di bidang Perekonomian yang dihasilkan. Dengan demikian maka dengan realisasi 8 rekomendasi dari 8 target rekomendasi yang telah ditepakan, maka capaian Kinerja sebesar 100% berdasarkan skala ordinal masuk kategori “**baik**”

Adapun Rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

**Tabel III. 2 - 2**

Ringkasan Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perekonomian yang dihasilkan  
Tahun 2021 Sasaran Strategis 1

No.	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan dibidang Perekonomian yang dihasilkan	Tanggal Rapat
1	2	3
1	Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 500/390/B.EKO-SET/2021 Tgl 08 Maret 2021 Tentang Peningkatan Pemerintah Daerah Terhadap Dukungan Penyaluran Kredit Program Usaha Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro	08 Maret 2021
2	Rekomendasi Rapat Tentang Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau dan Instansi Lembaga Vertikal	30 Maret 2021
3	Surat Edaran Gubernur Provinsi Kepulauan Riau No. 500/656/B.EKO-SET/2021 Tgl. 12 April 2021 Tentang Pengendalian Inflasi Menjelang Bulan Ramadhan dan Lebaran Tahun 1442 H/2021	12 April 2021
4	Rekomendasi Rapat Pelaksanaan Kebijakan Distribusi Pupuk Bersubsidi di Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021	10 Juni 2021

No.	Ringkasan Rekomendasi Kebijakan dibidang Perekonomian yang dihasilkan	Tanggal Rapat
1	2	3
5	Rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dengan tema “Mendorong Peningkatan Perang UMKM Pangan Melalui Optimalisasi Digitalisasi untuk mendukung Pemulihan Ekonomi dan Stabilitas Harga Pangan	25 Agustus 2021
6	Rekomendasi Rapat Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Provinsi Kepulauan Riau	28 September 2021
7	Rekomendasi Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air Provinsi Kepri Tahun Anggaran 2021 dengan Tema “Menjaga Ketersediaan dan Kelancaran Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT), Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) dan Liquited Petroleum Gas tabung 3 kg tepat sasaran”	03 Nopember 2021
8	Rekomendasi Rapat High Level Meeting (HLM) Pengendalian Inflasi Provinsi Kepri yang dihadiri Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Instansi Vertikal dengan agenda “Menjaga Stabilitas harga dan Ketersediaan Pangan Menjelang Natal dan Tahun Baru serta Musin Angin Utara 03 Nopember 2021	03 Nopember 2021

Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka didapat data perbandingan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III. 2 - 3**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Jumlah Rekomendasi Kebijakan di Bidang Perkonomian yang Dihasilkan

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
7	7	100	8	8	100

Persentase pencapaian pada indikator “jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perkonomian yang dihasilkan” ini jika dibandingkan dengan persentase pencapaian tahun sebelumnya, maka pencapaian tersebut tidak terdapat selisih, dan masih berada pada kondisi 100%. Namun jika diukur dengan perbandingan jumlah realisasi pada tahun 2021 dengan tahun 2020, maka terjadi peningkatan dari 7 rekomendasi menjadi 8 rekomendasi, atau terjadi peningkatan jumlah rekomendasi dengan selisih 1 rekomendasi. Sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa keseluruhan pencapaian tahun 2021 telah mengalami peningkatan dari tahun 2020.

### **3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD**

**Tabel III. 3 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD Tahun 2021

<b>Sasaran Strategis 3</b>				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>		
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Skor Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD	45	33,33	74,07

Capaian meningkatnya pembinaan dan pengawasan BUMD diperoleh dengan cara membagi antara Jumlah BUMD yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dinyatakan sehat dengan Total Jumlah BUMD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100. Realisasi indikator kinerja Skor Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD yaitu realisasi 33,33 target sebesar 45. Dengan demikian capaian kinerja Sasaran meningkatnya pembinaan dan pengawasan BUMD berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “**cukup baik.**”

#### **Skor Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD**

Untuk melaksanakan evaluasi kinerja BUMD didasarkan pada modul penilaian kinerja BUMD yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada

bulan Oktober 2017 dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepri, Penilaian Kinerja dilakukan setelah adanya hasil audit dari auditor Independen terhadap Laporan Keuangan Tahunan masing-masing Perusahaan BUMD yang dinyatakan dengan Kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau Wajar dengan Pengecualian. Standar waktu penyampaian laporan hasil audit oleh Akuntan Publik harus sudah diterima oleh pemegang saham atau Kepala Daerah paling lambat pada bulan ke-5 sejak tanggal tutup buku tahun yang bersangkutan sehingga pelaksanaan penilaian kinerja BUMD baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni–Juli.

Berdasarkan hal tersebut maka untuk tahun 2021 belum dapat ditentukan penilaiannya saat ini. Pelaksanaan penilaian kinerja BUMD tahun 2021 berdasarkan Modul Penilaian kinerja BUMD baru dapat dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan Juli 2022 (setelah selesai audit oleh akuntan public), sehingga ukuran yang dapat digunakan saat ini adalah hasil penilaian pada tahun 2020.

Untuk menilai apakah tata kelola BUMD sudah baik atau masih perlu perbaikan, perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD. BUMD yang sehat menurut Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002 adalah BUMD yang memiliki kinerja yang bernilai baik untuk tahun buku yang bersangkutan. Penilaian tingkat kesehatan BUMD menggunakan metode Balances Score Card terhadap aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi yang selanjutnya diklasifikasikan tingkat kesehatan BUMD apakah masuk dalam katagori sehat/kurang sehat/tidak sehat.

**Tabel III. 3 - 2**  
Klasifikasi Tingkat Kesehatan BUMD

<b>Sehat</b>	<b>Kurang Sehat</b>	<b>Tidak Sehat</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>AAA apabila total (TS) lebih besar dari 95</b>	<b>BBB apabila <math>50 &lt; TS \leq 65</math></b>	<b>CCC apabila <math>20 &lt; TS \leq 30</math></b>
<b>AA apabila <math>80 &lt; TS \leq 95</math></b>	<b>BB apabila <math>40 &lt; TS \leq 50</math></b>	<b>CC apabila <math>10 &lt; TS \leq 20</math></b>
<b>A apabila <math>65 &lt; TS \leq 80</math></b>	<b>B apabila <math>30 &lt; TS \leq 40</math></b>	<b>C apabila <math>TS \leq 10</math></b>

Sumber : Keputusan Menteri BUMN Nomor : KEP-100/MBU/2002

Evaluasi kinerja BUMD dilakukan berdasarkan Modul Penilaian Kinerja BUMD yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri pada Oktober 2017. Penilaian Kinerja BUMD dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk Tim Penilai Kinerja BUMD yang dibentuk oleh Kepala Daerah, penilaian kinerja BUMD dilakukan setelah adanya hasil pemeriksaan auditor independen oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepri terhadap laporan keuangan tahunan masing-masing BUMD yang dinyatakan dengan kualifikasi wajar tanpa pengecualian (WTP) atau wajar dengan pengecualian. Standar waktu penyampaian laporan hasil audit oleh akuntan publik harus sudah diterima pemegang saham atau kepala daerah paling lambat pada bulan ke-5 sejak tahun tutup buku tahun yang bersangkutan.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini memiliki 3 BUMD (PT. Pembangunan Kepri, PDAM Tirta Kepri dan Badan Usaha Pelabuhan), berdasarkan hasil penilaian tahun 2020, dapat disampaikan hal sebagai berikut:

- 1) PDAM Tirta Kepri setiap tahun dilakukan penilaian Kinerja oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepri. Berdasarkan tolak ukur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum, Nilai Tingkat Kinerja PDAM Tirta Kepri Tahun 2020 adalah sebesar 65,88 atau masuk kategori A (Sehat), dan jika dibandingkan tahun 2019 terdapat kenaikan nilai kinerja dari 64,07 menjadi 65,88.
- 2) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Pelabuhan Kepri berdasarkan hasil kinerja yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Kepri Tahun Buku 2020 disimpulkan bahwa belum dikelola secara efektif. Hal ini dapat terlihat capaian yang diperoleh dari penilaian indikator kinerja yang mendapatkan nilai 45,86 dari nilai maksimum 100 atau termasuk kategori BB (Kurang Sehat).
- 3) Badan Usaha Milik Daerah PT. Pembangunan Kepri untuk Tahun buku 2020 setelah dilakukan evaluasi oleh Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan Pewakilan Provinsi Kepri disimpulkan bahwa BUMD PT. Pembangunan Kepri belum dikelola secara efektif, hal ini dapat terlihat dari penilaian indikator kinerja yang masih mendapatkan nilai 38,62 dari nilai maksimum 100 atau masih dalam kategori B (Kurang Sehat).

Dengan demikian, dari 3 BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Riau, hanya 1 yang termasuk dalam kategori sehat, sedangkan 2 lainnya masuk dalam kategori kurang sehat. Beberapa upaya untuk penyehatan BUMD agar dapat dilakukan adalah menyelesaikan permasalahan BUMD, diantaranya :

- 1) Pemenuhan modal kerja BUMD
- 2) Penyelesaian Hutang BUMD
- 3) Pemilihan pengurus BUMD secara professional (direksi, dewan komisaris/dewan pengawas)
- 4) Ketersediaan kebijakan terkait pengembangan BUMD (naskah akademik, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, rekomendasi dll).

Sebagai perbandingan realisasi dan capaian kinerja, untuk tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka dapat dilihat pada berikut :

**Tabel III. 3 - 3**  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja  
Skor Rata-rata Tingkat Kesehatan BUMD

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
40	56,32	140,80	45	33,33	74,07

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa bahwa tahun 2021 terjadi penurunan realisasi dari tahun sebelumnya, jika pada tahun 2020, realiasi yang dicapai adalah 56,32 dari target 40 dan persentase capaian 140,40%, dan pada tahun 2021, realisasi yang dicapai adalah 33,33 dari target 45 dan persentase 74,07%, maka telah terjadi penurunan persentase capaian antara tahun 2021 dan tahun 2020. Jika tahun 2021 capaian 74,07 dan tahun 2020 capaian 140,80, maka terjadi penurunan capaian sebesar 66,73%.

Berdasarkan skor capaian indikator dan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD dinilai efisien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian indikator (74,07) lebih kecil dari realisasi anggaran (100%). Efisiensi tersebut dari tertundanya pelaksanaan penilaian BUMD tahun 2021 yang direncanakan pelaksanaannya pada bulan

April 2022. Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Peningkatan Kinerja BUMD.

Terkait dengan pentingnya laporan yang akuntabel atau dapat di pertanggungjawabkan, laporan hasil evaluasi kinerja BUMD sangat berguna untuk membantu Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal utama/pemegang saham, komisaris/dewan pengawas dan direksi dalam membuat kebijakan terkait perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kinerja BUMD ke depannya. Dengan demikian, tujuan, peran dan fungsi BUMD dapat terus terpantau dan sesuai dengan cita-cita Pemerintah Daerah.

#### **4. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang Akuntabel**

**Tabel III. 4 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang Akuntabel

<b>Sasaran Strategis 4</b>				
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah yang Akuntabel				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>		
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Peringkat LPPD Provinsi	Tinggi (skor 3,000)	Rendah (skor 1,9713)*	65,71
2	Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	100%	65,71%	65,71
<b>Capaian rata-rata</b>				<b>65,71</b>

\*Skor LPPD Tahun 2020

## **Peringkat LPPD Provinsi**

Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Hasil evaluasi atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (18 Urusan Wajib dan 8 Urusan Pilihan) ditetapkan dalam peringkat dan status kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota oleh Menteri Dalam Negeri.

Untuk tahun 2021 target yang ditetapkan Biro Pemerintahan dan Perbatasan dengan peringkat LPPD ‘Tinggi’. Capaian diukur berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri yang terdapat dalam website e-LPPD Tahun 2020, Provinsi Kepulauan Riau memperoleh skor 1,9713 dengan status R (rendah) capaian status LPPD tahun 2020 tersebut lebih rendah dari capaian tahun sebelumnya dikarenakan laporan hasil Pra Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2021 terhadap LPPD Tahun 2020 menggunakan Aplikasi SILPPD (Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) menggunakan website e-LPPD dengan mekanisme penilaian yang berbeda sehingga mempengaruhi hasil penilaian kinerja LPPD Provinsi Kepulauan Riau, adapun faktor lain yang mempengaruhi penilaian tersebut sebagai berikut:

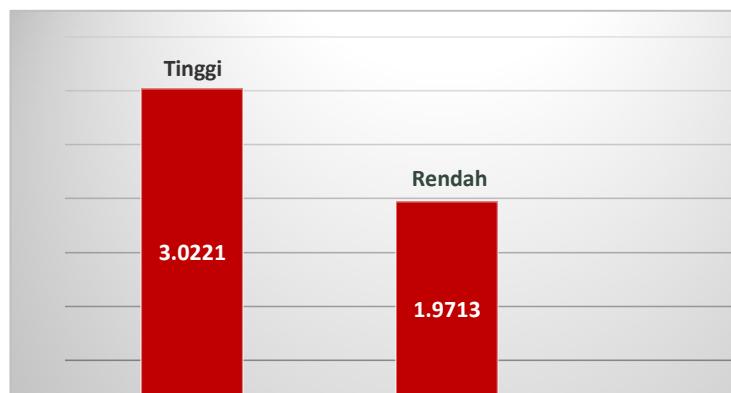
- 1) Proses penginputan data dokumen pendukung tiap perangkat daerah belum optimal;
- 2) Perbedaan kategori dalam penilaian skor kinerja di bawah ini:
  - a. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 dengan 4 kategori penilaian yaitu :

<b>No.</b>	<b>Skor Kinerja</b>	<b>Status Kinerja</b>
1.	s.d 1,00	Rendah
2.	1,01 – 2,00	Sedang
3.	2,01 – 3,00	Tinggi
4.	3,01 – 4,00	Sangat Tinggi

- b. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 menjadi 5 kategori penilaian yaitu :

No.	Skor Kinerja	Status Kinerja
1.	1.00 – 1.80	Sangat Rendah
2.	1.81 – 2.60	Rendah
3.	2.61 – 3.40	Sedang
4.	3.41 – 4.20	Tinggi
5.	4.21 – 5.00	Sangat Tinggi

**Gambar III. 4 - 1**  
Grafik Peringkat LPPD Provinsi Kepri



Tahun 2019 Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan skor 3.0221 dengan prestasi Tinggi (Peringkat Tinggi). Sementara untuk Tahun 2020 skor LPPD Provinsi Kepri mendapatkan skor 1.9713 dengan prestasi Rendah (Peringkat Rendah), sehingga capaian indikator kinerja LPPD Provinsi Kepri tahun 2020 adalah 65,71% dan termasuk dalam kategori “cukup baik”.

Hal tersebut dikarenakan belum optimalnya penginputan data dokumen pendukung dalam website e-LPPD tentang penangan urusan urusan wajib yang menjadi kriteria penilaian pemerintah pusat, serta hasil penilaian ini dari Kemendagri masih sementara karena website e-LPPD masih dalam proses simulasi dan data pendukungnya akan diolah kembali.

Dibanding dengan target 2019, beberapa hal yang harus diperbaiki agar Peringkat LPPD Provinsi meningkat sebagai berikut:

- a. Berkinerja sangat rendah pada 6 urusan yaitu kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, statistic, persandian, perhubungan, pangan, kearsipan, pariwisata dan pertanian;
- b. Berkinerja Rendah pada 8 urusan yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat desa, lingkungan hidup, perpustakaan, perindustrian, perumahan rakyat, penanaman modal dan pengadaan;
- c. Berkinerja sedang pada 8 urusan yaitu trantibumlinmas, PUPR, koperasi dan UKM, pertanahan, perdagangan, ESDM, kelautan dan perikanan serta manajemen keuangan;
- d. Berkinerja tinggi pada 8 urusan yaitu Kesehatan, adminduk, tenagakerja, pengendalian kependudukan dan KB, kehutanan, perencanaan dan keuangan, kepegawaian serta transparansi dan partisipasi publik;
- e. Berkinerja sangat tinggi pada 3 urusan yaitu Pendidikan, sosial, dan kominfo.

Kendala dalam pencapaian target indikator peringkat LPPD Provinsi Kepri yakni:

- a. Belum optimalnya koordinasi dalam penyajian data yang dilakukan oleh OPD sebagai Tim Penyusun LPPD yang melaksanakan urusan;
- b. Sering terjadinya pergantian pemangku jabatan/petugas sebagai tim penyusun LPPD di OPD yang melakukan urusan;
- c. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah dalam penyusunan LPPD di setiap tahunnya.
- d. Belum tersaji dengan baik dokumen pendukung dari masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau maupun Kabupaten/Kota
- e. Belum terbangunnya *mindset* pendokumentasian data kinerja yang berakibat LPPD hanya memenuhi syarat ketepatan penyampaian laporan kinerja pemerintah daerah

- f. Adanya perbedaan capaian kinerja setelah dilakukan evaluasi yang disebabkan berbedanya data dengan dokumen pendukung (terkecuali Laporan Keuangan)
- g. Adanya kecenderungan “yang penting menyampaikan laporan” bukan pada kualitas pelaporan;
- h. Tidak mengintegrasikan Capaian Prestasi Kinerja LPPD dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah serta OPD dalam Program dan Kegiatan.

Menyikapi hal tersebut, ke depan akan dilakukan koordinasi yang lebih intensif melalui peningkatan frekuensi rapat koordinasi baik yang didukung oleh dana APBD maupun APBN. Koordinasi dimaksud akan dilakukan dengan berbagai pihak yakni perangkat daerah-perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, Tim Penyusun LPPD Kabupaten/Kota, Tim dari Inspektorat Provinsi Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat untuk mendapatkan data indikator kinerja kunci yang valid dan reliable serta membangun kesadaran para stakeholder akan pentingnya data dimaksud sebagai langkah konkret aparatur sipil negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Berkenaan dengan hal tersebut melalui koordinasi yang lebih intensif diharapkan ke depan akan dapat diperoleh hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan koordinasi dalam penyajian data yang dilakukan oleh OPD sebagai Tim Penyusun LPPD untuk menjadikan LPPD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif antar Perangkat Daerah untuk melengkapi IKK pada LPPD;
- 3) Melaksanakan pengendalian Pencapaian Kinerja setiap IKK supaya bernilai sangat tinggi oleh Perangkat Daerah penanggungjawab IKK;
- 4) Membangun Sistem Pendataan yang Baik untuk Pendokumentasi Data Dukung terhadap Capaian Kinerja IKK;
- 5) Melakukan *self assessment/evaluasi kinerja mandiri* sebelum LPPD ditetapkan (dikoordinir Sekda);

- 6) Mengintegrasikan Capaian Prestasi Kinerja LPPD dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan OPD;
- 7) Bertahannya capaian kinerja yang sudah diperoleh;
- 8) Tersusunnya pelaporan SPM dan Pelaporan Kinerja yang komprehensif.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.069.260.246,00 (99.23%) dan realisasi fisik sebesar 100% dari pagu Rp 1.077.549.900,00.

Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka didapat data perbandingan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III. 4 - 2**  
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada  
Indikator Kinerja Peringkat LPPD Provinsi

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Tinggi (skor 2,01 s.d. 3,00)	Sangat Tinggi (skor 3,0221)	100.73	Tinggi (skor 3,000)	Rendah (skor 1,9713)	65,71

#### **Percentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah**

Tata kelola pemerintahan diukur untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan Pemerintah Provinsi Kepri melaksanakan fungsi koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik di lingkungan Pemerintah Provinsi, kabupaten/kota maupun kerja sama dengan pihak lain selama satu tahun anggaran yang disajikan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD).

Untuk tahun 2020 target yang ditetapkan adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 100%. Persentase penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah diperoleh dengan cara realisasi skor penyelenggaraan pemerintahan daerah dibagi dengan target skor

penyelenggaraan pemerintahan daerah dikali 100. Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri, Provinsi Kepulauan Riau mendapat skor 1,9713 dari target tinggi (skor 3,000), maka capaian kinerja LPPD Provinsi Kepri tahun 2020 adalah 65,71%, sehingga dengan demikian maka selanjutnya setelah dilakukan penilaian, maka capaian indikator kinerja, Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah adalah 65,71%, dan masuk dalam kategori ‘**cukup baik**’.

Dalam mencapai kinerja Sasaran dimaksud, kendala yang dihadapi adalah belum optimalnya koordinasi baik antar OPD lingkup Pemerintah Provinsi Kepri maupun dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut, diharapkan ke depan Pemerintahan Provinsi Kepri dapat lebih meningkatkan koordinasi utamanya terkait penyiapan data dan informasi penyelenggaraan tata kelola pemerintah daerah. Pencapaian ini tidak terlepas dari koordinasi urusan penyelenggaraan pemerintahan umum dengan pihak di luar pemerintah (sektor swasta dan masyarakat), mengingat pihak di luar pemerintah turut serta membantu menyusun formula kebijakan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Pencapaian sasaran ini didukung oleh Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.069.260.246,00 (99.23%) dan realisasi fisik sebesar 100% dari pagu Rp 1.077.549.900,00.

Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka didapat data perbandingan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III. 4 - 3**  
Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja  
Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100,73%	100,73	100%	65,71%	65,71

**5. Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukur**

**Tabel III. 5 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukur Tahun 2021

<b>Sasaran Strategis 5</b>				
Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukur				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>		
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	100% (31 PD dari 31 PD)	100% (31 PD dari 31 PD)	100

**Persentase PD yang Telah Tepat Fungsi dan Tepat Ukur Kelembagaannya**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah, yakni dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien.

Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun

urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Perangkat Daerah yang efektif dan efisien adalah Perangkat Daerah tepat fungsi dan tepat ukur dengan memenuhi tingkat kesesuaian struktur organisasi dengan kebutuhan sehingga dapat mencapai target yang ditetapkan. Perangkat Daerah yang efektif dan efisien memperhitungkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing daerah.

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 ini merupakan penyempurnaan dari

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan penyempurnaan dengan merubah Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

Untuk tahun 2021 terget yang ditetapkan adalah 100% perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur. Capaiannya diukur dari jumlah OPD (organisasi perangkat daerah) yang tertata kelembagaannya (31 PD) dibagi jumlah total OPD (31 PD) dikali seratus.

Dilihat dari target tahun 2021 Perangkat Daerah (PD) yang telah tepat fungsi dan tepat ukur sebesar 100% (target 31 PD dari total 31 PD). Realiasi sebesar 100% (dari 31 PD dibagi 31 PD) sehingga capaian di tahun 2021 sebesar 100% masuk kategori “**baik**.”

**Tabel III. 5 - 2**

Daftar Perangkat Daerah Sebelum dan Sesudah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

No	JML OPD	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SESUAI PERGUB 59 TAHUN 2017, TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH)	TIPE	HASIL REKOMENDASI KEMENDAGRI TAHUN 2021 (NAIK TIPE DAN PERUBAHAN NOMENKLATUR) BERDASARKAN SURAT 188.34/6319/OTDA TGL 04 OKTOBER 2021, TENTANG FASILITASI RANCANGAN PERATURAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU (TERHADAP PERUBAHAN OPD)	TIPE	NO	JML OPD	PERANGKAT DAERAH SESUAI PERDA SOTK 2021 (PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2021, TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH)	TIPE
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	1	Sekretariat Daerah	A	-		I	1	Sekretariat Daerah	A
1		Biro Pemerintahan dan Perbatasan		-		1		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	-
2		Biro Hukum		-		2		Biro Hukum	-
3		Biro Kesejahteraan Rakyat		-		3		Biro Kesejahteraan Rakyat	-

4		Biro Administrasi Perekonomian		Biro Perekonomian dan Pembangunan	A	4	Biro Perekonomian dan Pembangunan	A	
5		Biro Administrasi Pembangunan							
6		Biro Pengadaan Barang dan Jasa		-		5	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	-	
7		Biro Umum		-		6	Biro Umum	-	
8		Biro Organisasi dan KORPRI		-		7	Biro Organisasi	-	
9		Biro Humas, Protokol dan Penghubung		-		8	Biro Administrasi Pimpinan	-	
				Badan Penghubung Daerah	Non Tipe	9	2	Badan Penghubung Daerah	Non Tipe
10	2	Sekretariat DPRD Provinsi Kepri	C	-		10	3	Sekretariat DPRD	C
11	3	Inspektorat Daerah	B	-		11	4	Inspektorat Daerah	B
12	4	Dinas Pendidikan	A	-		12	5	Dinas Pendidikan	A
13	5	Dinas Kesehatan	A	-		13	6	Dinas Kesehatan	A
14	6	Dinas Pekerjaan Umum,	B	Dinas Pekerjaan Umum,	A	14	7	Dinas Pekerjaan Umum,	A

		Penataan Ruang dan Pertanahan		Penataan Ruang dan Pertanahan				Penataan Ruang dan Pertanahan	
15	7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	C	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	15	8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B
16	8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	A	-		16	9	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	A
17	9	Dinas Sosial	A	-		17	10	Dinas Sosial	A
18	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A	-		18	11	Dinas Pemberdayaan Perempuan. Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	A
19	11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A	-		19	12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	A
20	12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan Pencapil	A	-		20	13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A

21	13	Dinas Perhubungan	B	-		21	14	Dinas Perhubungan	B
22	14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	A	-		22	15	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	A
23	15	Dinas Komunikasi Informatika	A	-		23	16	Dinas Komunikasi dan Informatika	A
24	16	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A	-		24	17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	A
25	17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A	-		25	18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	A
26	18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Non tipe	26	19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Non tipe
27	19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	B	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	A	27	20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	A
28	20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	-		28	21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B
29	21	Dinas Kelautan dan Perikanan	A	-		29	22	Dinas Kelautan dan Perikanan	A
30	22	Dinas Pariwisata	A	-		30	23	Dinas Pariwisata	A

31	23	Dinas Kebudayaan	A	-		31	24	Dinas Kebudayaan	A
32	24	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	A	-		32	25	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	A
33	25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	A	-		33	26	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	A
34	26	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	B	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	A	34	27	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	A
35	27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	B	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A	35	28	Badan Keuangan dan Aset Daerah	A
36	28	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	B	Badan Pendapatan Daerah	A	36	29	Badan Pendapatan Daerah	A
37	29	Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia	B	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	A	37	30	Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI	A
		-		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	B	38	31	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	B

38	30	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Non Tipe	39	32	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Non Tipe
39	31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A	-		40	33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	A
		-		Badan Pengelola Perbatasan Daerah	A	41	34	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	A
<b>TOTAL OPD KONDISI SAAT INI</b>			<b>31</b>				<b>34</b>	<b>TOTAL OPD SETELAH PERDA SOTK 2021</b>	<b>34</b>

Catatan : Penambahan OPD baru

1. Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Tipe A
2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A
3. Badan Penghubung Daerah (Non Tipe)

Sumber: Biro Organisasi dan Korpri Sekretariat Daerah Prov. Kepri

Dilihat dari tabel di atas jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2017 berjumlah 31 Organisasi Perangkat Daerah dan jumlah Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 berjumlah 34 Organisasi Perangkat Daerah, dengan perubahan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Perangkat Daerah Baru :
  1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Tipe B
  2. Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A (Sesuai Permendagri 140 Tahun 2017)
  3. Badan Penghubung Daerah (Non Tipe)
- b. Pemisahan Dan Penambahan Urusan Perangkat Daerah:
  1. BKPSDM Tipe B menjadi Badan Kepegawaian Daerah dan KORPRI Tipe A.
  2. Inspektorat Daerah Tipe B (tambah 1 Inspektur Pembantu namun tidak terjadi perubahan tipologi sesuai PP 72 Tahun 2019)
  3. Biro Administrasi Perekonomian digabung dengan Biro Administrasi Pembangunan menjadi Biro Perekonomian dan Pembangunan.
- c. Peningkatan Tipe Perangkat Daerah:
  1. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan dari Tipe B ke Tipe A
  2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dari Tipe C ke Tipe B
  3. Dinas dan Olahraga dari Tipe B ke Tipe A
  4. DPMPTSP dari Tipe A menjadi Non Tipe (sesuai Permendagri 25 Tahun 2021) Kepemudaan
  5. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tipe A (Penambahan 1 Bidang)
  6. Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Tipe B Ke Tipe A (Naik Tipe dan Perubahan Nomenklatur)
  7. Badan Pendapatan Daerah dari Tipe B ke Tipe A (Naik Tipe dan Perubahan Nomenklatur)

**Tabel III. 5 - 3**  
 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Cabang Dinas

No	CABANG DINAS/UPT	KELAS
(1)	(2)	(3)
<b>DINAS PENDIDIKAN</b>		
1	UPT Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan	A
2	Cabang Dinas Pendidikan Kota Batam	A
3	Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun	B
4	Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna	B
5	Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Anambas	B
6	Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga	B
<b>DINAS KESEHATAN</b>		
7	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	B
8	UPT Rumah Sakit Umum Daerah Engku Haji Daud	C
<b>DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN</b>		
9	UPT Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur	A
10	UPT Laboratorium Bahan Konstruksi dan Peralatan	A
<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB</b>		
11	UPT Perlindungan Dan Anak	A
<b>DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI</b>		
12	UPT BLK dan Pengembangan Produktifitas	A
13	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kota Batam	B
14	UPT Pengawasan Ketenagakerjaan Kabupaten Karimun	B
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>		
15	UPT Wilayah I Batam	B
16	UPT Wilayah II Karimun	B
17	UPT Wilayah III Tanjungpinang dan Bintan	B
18	UPT Wilayah IV Natuna dan Anambas	B

19	UPT Wilayah V Lingga	B
	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b>	
20	Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Batam	A
21	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit I Karimun	A
22	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit III Lingga	A
23	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit IV Bintan-Tanjungpinang	A
24	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit V Natuna	A
25	Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit VI Anambas	A
26	UPT Laboratorium Lingkungan Hidup	A
	<b>DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	
27	UPT Balai Pelabuhan Perikanan Pantai	A
26	UPT Balai Pengujian Mutu & Pengembangan Produk Kelautan & Perikanan	A
27	UPT Balai Benih Ikan	A
28	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam	A
29	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Karimun	A
30	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Natuna	A
31	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Anambas	A
32	Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga	A
	<b>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESWAN</b>	
33	UPT Balai Yankes Hewan, Kes Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan	A
34	UPT Balai Perbenihan, Pengawasan Dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	A
	<b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>	
35	UPT Perpustakaan	B
	<b>BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b>	
36	UPT Pengelolaan Dana Bergulir	B
37	UPT Pemberdayaan dan Pemanfaatan Aset	B
	<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>	
38	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batam Centre	A
39	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjungpinang	A
40	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Bintan	A

41	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Karimun	A
42	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Lingga	A
43	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Natuna	A
44	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Anambas	A
45	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Batuaji	B
46	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Kijang	B
47	UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Tanjung Batu	B

Sumber: Biro Organisasi dan Korpri Sekretariat Daerah Prov. Kepri

Dari tabel di atas, tampak jelas bahwa realisasi PD yang telah tepat fungsi dan tepat ukur tahun 2021 sebesar 100% (31 PD), (47 UPT/Cabang Dinas yang terbentuk dari 12 Perangkat Daerah).

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah belum semua pedoman nomenklatur perangkat daerah dari kementerian tersedia. Hal tersebut menyulitkan dilakukannya penyesuaian nomenklatur dan tugas perangkat daerah. Upaya yang telah dilakukan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk mengatasi kendala tersebut adalah mendorong perangkat daerah, dan ikut serta melakukan koordinasi dengan kementerian teknis, serta melakukan monitoring evaluasi atas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan persentase capaian indikator dan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran terwujudnya organisasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian indikator (100%) lebih kecil dari pada persentase realisasi anggaran (99,48%). Pencapaian ini didukung oleh program kelembagaan Organisasi dengan realisasi Rp52.079.650,00 (99,48%) dari pagu Rp52.352.900,00.

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut :

**Tabel III. 5 - 4**

Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja  
Persentase Perangkat Daerah yang telah Tepat Fungsi dan Tepat Ukur  
Kelembagaannya

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
87% (27 PD dari 31 PD)	87% (27 PD dari 31 PD)	100%	100% (31 PD dari 31 PD)	100% (31 PD dari 31 PD)	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian sasaran Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukur dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya tahun 2021 sebesar 100%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 100%, maka tidak terjadi peningkatan secara persentase, namun secara faktual meningkat dalam capaian jumlah Perangkat yang tertata kelembagaannya. Sehingga berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori **“Baik.”**

## 6. Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau

**Tabel III. 6 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi Dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

<b>Sasaran Strategis 6</b>				
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>		
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Nilai/Indeks Reformasi Birokrasi	75 (Kategori BB)	68,57* (Kategori B)	91,42%

Keterangan: \*Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2020 sehubungan dengan belum diterimanya Nilai RB Tahun 2021

### **Nilai/Indeks Reformasi Birokrasi**

Nilai Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauhmana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintah yang bertujuan pada pemerintah yang efektif, efesien, bersih dan bebas dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Semakin tinggi nilai reformasi birokrasi, semakin baik pengelolaan tata pemerintahan yang efektif dan efesien, bebas dari KKN dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas .

Untuk tahun 2021 target yang ditetapkan pada Sekretariat Daerah Provinsi Provinsi Kepulauan Riau adalah nilai minimal 75 dengan “kategori BB”. Nilai reformasi Birokrasi diukur dengan instrumen evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi yang dikembangkan oleh Kementerian PAN dan RB yang berpedoman pada Peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi.

Realisasi nilai Reformasi Birokrasi (RB) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 merupakan nilai RB Tahun 2020 sehubungan dengan belum

diterimanya nilai RB tahun 2021. Realisasi nilai RB tahun 2021 adalah 68,57% dengan “kategori B” dari target 75 dengan capaian 91,42% hal tersebut menunjukan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menerapkan Reformasi Birokrasi belum optimal untuk mencapai target.

**Tabel III. 6 - 2**

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Prov. Kepri Tahun 2020

N O	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2020	
1	2	3	4	
A	<b>Komponen Pengungkit</b>			
	I. Pemenuhan	20,00	12,74	
	II. Hasil Antara Area Perubahan	10,00	6,52	
	III. Reform	30,00	16,44	
<b>Total Komponen Pengungkit</b>		<b>60,00</b>	<b>35,70</b>	
B	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	8,27	
2.	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,75	
3.	Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	10,00	9,13	
4.	Kinerja Organisasi	10,00	6,72	
<b>Total Komponen Hasil</b>		<b>40,00</b>	<b>32,87</b>	
<b>Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)</b>		100,00	<b>68,57</b>	

Sumber : Kementerian PAN dan RB Tahun 2020

**Tabel III. 6 - 3**  
**Kategori dari Penilaian Reformasi Birokrasi**

NO	KATEGORI	NILAI	INTERPRESTASI
		ANGKA	
1	AA	>90-100	Istimewa
2	A	>80-90	Memuaskan
3	BB	>70-80	Sangat Baik
4	B	>60-70	Baik, perlu sedikit perbaikan
5	CC	>50-60	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6	C	>30-50	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar
7	D	>0-30	Sanagat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar

Sumber : Peraturan Menpan dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi

Realisasi nilai RB tahun 2020 sebesar 68,57. Realisasi tersebut lebih besar dengan nilai RB tahun 2019 yaitu 67,98. Hal ini menunjukan komitmen Pemerintah Provinsi dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi dari tahun ke tahun ada menunjukan peningkatan komitmen dalam meningkatkan reformasi birokrasi.

**Tabel III. 6 - 4**  
 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja  
 Nilai/Indeks Reformasi Birokrasi

Tahun 2019			Tahun 2020		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
70 (Kategori B)	67,98 (Kategori B)	97,11%	75 (Kategori BB)	68,57* (Kategori B)	91,42

Keterangan: \*Nilai Reformasi Birokrasi (RB) Tahun 2020 sehubungan dengan belum diterimanya Nilai RB Tahun 2021

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian sasaran meningkatnya nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “**baik**” dengan capaian 91,42%. Namun kondisi ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan (lebih rendah dari target) yakni target telah ditetapkan adalah nominal 75 (kategori BB) namun realisasi hanya berada pada nominal 68,57 (Kategori B). Akan tetapi secara keseluruhan, capaian indikator kinerja Nilai/Indeks Reformasi Birokrasi masih berada pada kategori “**baik**”.

Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2019, nominal realisasi mengalami peningkatan, yakni dari angka 67,98 pada tahun 2020 menjadi 68,57. Namun karena terjadi selisih target antara tahun 2019 (target 70) dan tahun 2020 (target 75) maka capaian tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2019, yakni dari 97,11% menjadi 91,42%.

Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau tetap harus melakukan upaya untuk mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui penataan kelembagaan. Dalam hal agenda reformasi birokrasi penataan kelembagaan diperlukan untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien yang digabarkan dengan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu melakukan perbaikan tata kelola pemerintah. Pemerintah Provinsi Kepri juga memerlukan upaya yang konsisten, sistematis dan terencana dari seluruh pihak yang terkait agar dapat mencapai target nilai reformasi birokrasi disamping belum meratanya pemahaman ASN kan pentingnya pelaksanaan reformasi birokrasi.

Berdasarkan persentase capaian indikator dan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau dinilai tidak efesien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian indikator (91,42%) lebih kecil daripada persentase realisasi anggaran (98,30%).

## 7. Indeks Kepuasan Masyarakat

**Tabel III. 7 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2021

Sasaran Strategis 7				
Indeks Kepuasan Masyarakat				
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik OPD di Prov. Kepri	B	B	100%

### Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik OPD di Prov. Kepri

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam beberapa waktu terakhir terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah. Sebagaimana amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dimana Negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk

memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Untuk itu berbagai terobosan dan perbaikan telah dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, dalam hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana dampak yang dihasilkan dari perbaikan tersebut melalui pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. IKM merupakan hasil Pengukuran kinerja pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan, khususnya yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Pengukuran IKM dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat tersebut.

Dalam Permenpan No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;
- d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 unsur yang terdiri dari:

1. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative

2. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan
3. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan
4. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan Berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan
8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha,pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat (SKM), perangkat daerah tidak mendapatkan kendala/hambatan yang signifikan. Umumnya perangkat daerah hanya terkendala keterbatasan kemampuan SDM aparatur yang dimiliki.

Kedepan, Sekretariat Daerah sebagai pembina dan koordinator pelayanan publik akan selalu memberikan peningkatan pengetahuan penyusunan survei kepuasan masyarakat melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis bagi aparatur pelaksana survei.

**Tabel III. 7 - 2**  
**Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021**

No	Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (UPTD. Perlindungan Perempuan dan Anak)	94.08	A	Sangat Baik
2	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	91.65	A	Sangat Baik
3	Biro Administrasi Pembangunan	88.38	A	Sangat Baik
4	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	87.81	B	Baik
5	Sekertariat DPRD	87.34	B	Baik
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86.29	B	Baik
7	Biro Organisasi dan Korpri	85.29	B	Baik
8	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	84.99	B	Baik
9	Biro Administrasi Perekonomian	84.83	B	Baik
10	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	84.54	B	Baik
11	Biro Pengadaan Barang/Jasa	84.25	B	Baik
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	83.87	B	Baik
13	Dinas Kelautan dan Perikanan	83.56	B	Baik
14	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan	83.39	B	Baik

No	Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	81.51	B	Baik
16	RSUD Engku Haji Daud Tanjunguban	81.00	B	Baik
17	Dinas Kesehatan	80.98	B	Baik
18	Dinas Pendidikan	80.02	B	Baik
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	79.08	B	Baik
20	Biro Humas Protokol dan Penghubung	78.87	B	Baik
21	RSUD Raja Ahmad Tabib Tanjungpinang	78.76	B	Baik
22	Dinas Sosial	77.50	B	Baik
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (UPTD. Perpustakaan Muhammad Sani)	76.81	B	Baik
	Jumlah	1924.80		
	Rata-Rata Nilai IKM Provinsi Kepri	83.69	B	Baik

Sumber: Laporan IKM Perangkat Daerah Tahun 2021

Nilai indeks yang mempresentasikan tingkat penyelenggaraan pelayanan publik dikelompokan berdasarkan kategori sebagai berikut :

**Tabel III. 7 - 3**

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANA N (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	2	3	4	5
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permenpan No. 14 Tahun 2017

Untuk tahun 2021 target IKM yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah kategori “B” (dengan indeks 83,00). Adapun capaian IKM Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 adalah kategori B dengan nilai (dengan indeks 83,69). Sehingga capaian tahun 2021 melebihi target sebesar 100,83%. capaian sasaran indeks kepuasan masyarakat tahun 2021 berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “**sangat baik**”.

Dibandingkan tahun sebelumnya, pada tahun 2020 target Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pelayanan Publik OPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah kategori B (Indeks 74), dengan Capaian IKM adalah kategori B (Indeks 82,89) masuk kategori “baik”. Pencapaian Sasaran ini didukung oleh program peningkatan kualitas pelayanan dan informasi publik dengan realisasi Rp. 240.880.100,00 dari pagu Rp. 244.155.200,00.

**Tabel III. 7 - 4**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik OPD di Prov. Kepri

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
B (74)	B (82,89)	112,01	B (83,00)	B (83,69)	100,83

Berdasarkan persentase capaian indikator dan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat dinilai efesien. Hal ini dapat dilihat dari persentase capaian indikator (100,83%) lebih besar dari pada persentase realisasi anggaran (99,98%).

Adapun upaya yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada Unit-Unit Layanan
2. Monitoring dan Evaluasi terhadap Pelayanan Publik Provinsi dan Kabupaten/Kota

3. Pembinaan dan Asistensi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Kepulauan Riau

## 8. Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan

**Tabel III. 8 - 1**

Capaian Kinerja Kinerja Sasaran Strategis Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan  
Tahun 2021

<b>Sasaran Strategis 8</b>				
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>		
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Persentase Ketepatan Waktu Realisasi Pengadaan Proyek di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	87,00%	92,28%	106,07

### **Persentase Ketepatan Waktu Realisasi Pengadaan Proyek di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis “Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan”, ditetapkan 1 (satu) indikator kinerja yang harus dicapai, yaitu Persentase Ketepatan Waktu Realisasi Pengadaan Proyek di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Indikator kinerja ini dicapai melalui Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa melalui kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan sub kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan

Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Persentase Ketepatan Waktu Realisasi Pengadaan Proyek di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau merupakan indikator utama untuk mengukur apakah Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Pengadaan. Indikator ini membandingkan tanggal akhir pelaksanaan yang telah direncanakan dengan tanggal akhir pelaksanaan aktual (tanggal Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan).

Berdasarkan data yang diperoleh dari UKPBJ terdapat 330 paket yang telah diumumkan di SiRUP yang berasal dari seluruh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, paket yang masuk ke UKPBJ sebanyak 311 paket dan ditayangkan/dilelang melalui LPSE sebanyak 304 Paket sedangkan 7 lainnya melalui penunjukan langsung. Dari 304 yang ditayangkan tersebut 285 paket telah selesai dilaksanakan dengan pagu Rp346.727.949.980,00 sedangkan penunjukan langsung sebanyak 7 paket dengan total pagu Rp4.869.236.000,00 dan paket lelang yang batal sebanyak 18 paket dengan total pagu Rp31.986.261.888,00 yang terdiri dari 9 OPD dengan 18 Paket dengan rincian sebagai berikut:

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat 2 Paket, batal karena :
  - a) Setelah dikaji ulang antara Pokja dengan PPK ada kesepakatan akan menggunakan sistem e-katalog.
  - b) Keterbatasan anggaran.
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah terdapat 2 Paket, batal karena:
  - a) Termasuk pengadaan yang dikecualikan dimana harga/tarif sewa dipublikasikan secara luas kepada masyarakat maka tahap pelaksanaan pemilihan tidak diperlukan mengacu pada Peraturan LKPP No. 12 Thn 2018 BAB IV Pasal 6.
  - b) Dari Tender menjadi Penunjukan Langsung karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 pasal 126.
3. Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah terdapat 1 Paket, batal karena perubahan kode rekening belanja yang tercantum pada DPA SKPD.

4. Dinas Kelautan dan Perikanan terdapat 1 Paket, batal karena ketidaksesuaian penempatan kode rekening.
5. Dinas Kesehatan terdapat 2 Paket, batal karena :
  - a) Ketidak sesuaian nomenklatur penganggaran pada DPA APBD 2021
  - b) Proses tender sudah 2 kali hanya 1 penyedia yang masukkan penawaran jadi tender dibatalkan.
6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan terdapat 1 Paket, batal karena LPSE Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa menarik paketnya karena langsung di LPSE Kementerian Pertanian dengan anggaran APBN.
7. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terdapat 2 Paket, batal karena :
  - a) Terdapat kesalahan mata anggaran/kode rekening pada Sub kegiatan sehingga belum dapat melanjutkan proses lelang fisik sampai pelaksanaan menunggu perubahan mata anggaran/kode rekening.
  - b) Terdapat perubahan mata anggaran/kode rekening.
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdapat 1 Paket, batal karena sudah konsultasi dengan LKPP karena Covid jadi prosesnya Penunjukkan Langsung antara PPK dengan Penyedia.
9. Dinas Perpustakan dan Kearsipan terdapat 1 Paket, batal karena jadwal penandatanganan kontrak pada tanggal 31 Agustus 2021 diperkirakan akan melawati batas waktu penerimaan dokumen persyaratan penyaluran anggaran yang telah di tetapkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Wilayah Kepri.
10. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman terdapat 2 Paket, batal karena Refocusing Anggaran.
11. Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang terdapat 3 Paket, batal karena:
  - a) Rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Perubahan (APBD-P) Tahun 2021
  - b) Rasionalisasi Anggaran Pendapatan Belanja dan Pendapatan Perubahan (APBD-P) Tahun 2022
  - c) Proses tender sudah 2 kali dilaksanakan tetapi tidak ada penyedia yang memasukkan penawaran

Dari 285 paket lelang yang sudah selesai proses pemilihan seluruhnya telah selesai dilaksanakan, dari 285 paket yang selesai sebanyak 263 paket selesai tepat waktu dengan nilai pagu sebesar Rp. 336.519.563.880,- dan sebanyak 22 paket mengalami keterlambatan (tidak tepat waktu) dengan nilai pagu Rp.10.208.386.100,- yang terdiri dari 8 OPD dan 21 Paket dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepulauan Riau 1 Paket
2. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Provinsi Kepulauan Riau 7 Paket
3. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau 1 Paket
4. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau 1 Paket
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Kepulauan Riau 7 Paket
6. Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau 2 Paket
7. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau 1 Paket
8. Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau 1 Paket

Keterlambatan tersebut disebabkan antara lain :

- a) Proses perencanaan yang belum baik sehingga penentuan tanggal pemilihan Dan tanggal pelaksanaan di sirup tidak relevan
- b) Adanya proses gagal tender sehingga dilakukan tender ulang
- c) Pada beberapa paket proses Pemilihan Dan Pelaksanaan pekerjaan tidak mengacu pada perencanaan . Contohnya paket A Di sirup telah mulai dilakukan pemilihan pada bulan maret namun dokumen permohonan proses tender baru diajukan ke ukpj pada bulan April.

Jika dilihat dari tabel dan beberapa penjelasan diatas, maka dapat diperhatikan bahwa Persentase Ketepatan Waktu Realiasi Pengadaan Proyek di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2021 telah tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan dimana realisasinya sebesar 92,28% dari target yang telah ditentukan sebesar 87% sehingga diperoleh Capaian Kinerja Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan sebesar 106,07%, dengan demikian berdasarkan skala ordinal masuk kategori “**sangat baik**.”

Berbagai rencana aksi telah dilakukan oleh pokja untuk lebih meningkatkan capaian indikator kinerja antara lain dengan :

- 1) Pendampingan Proses Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pada OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Oleh Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Menghasilkan Dokumen Perencanaan yang baik dan Rasional.
- 2) Memastikan OPD Melaksanakan proses Pengadaan Barang/Jasa Sesuai dengan Waktu yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui monitoring dan pemantauan pada Aplikasi SIRUP.
- 3) Percepatan Proses Pemilihan Oleh Kelompok Kerja Pemilihan UKPBJ Provinsi Kepulauan Riau dengan Durasi Pemilihan yang mengacu pada SOP yang telah ditetapkan.
- 4) Implementasi Tender Dini Pada Tahun Anggaran Berjalan Untuk Paket Pengadaan Tahun Anggaran yang akan datang, Khususnya pada paket pengadaan yang bersifat rutin dan memerlukan waktu pelaksanaan satu tahun anggaran.
- 5) Implementasi Tender Cepat Untuk Paket Pengadaan yang memenuhi kriteria untuk dilakukan pemilihan dengan metode tender cepat.

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut :

**Tabel III. 8 - 2**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Ketepatan Waktu Realisasi Pengadaan Proyek di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
83%	86,57 %	104,30	87%	92,28%	106,07

Capaian Sasaran Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan indikator persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah provinsi Kepulauan Riau tahun 2021 (sebesar 106,07%) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 104,30% terjadi peningkatan sebesar 1,77% dan capaian ini berdasarkan skala pengukuran ordinal masuk kategori “**Sangat Baik.**” Diharapkan Pokja di tahun mendatang agar lebih maksimal dalam melancarkan rangkaian aksi untuk memperoleh barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, kompetitif, adil, terbuka, dan akuntabel.

## 9. Tersedianya Produk Hukum Provinsi yang Tidak Tumpang Tindih

**Tabel III. 9 - 1**

Capaian Kinerja Kinerja Sasaran Strategis Tersedianya Produk Hukum Provinsi Yang Tidak Tumpang Tindih

<b>Sasaran Strategis 14</b>				
Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>		
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	7	19	271,42

Peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan penyempurnaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menyempurnakan dan mengevaluasi produk hukum yang telah berlaku di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya produk hukum dimaksud ditemukan adanya pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan.

Banyaknya peraturan produk hukum daerah yang dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan diperoleh dengan cara mencapai jumlah peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan dengan target yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2021 target yang ditetapkan adalah 7 peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan. Capaianya diukur dari jumlah produk hukum yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan (19 dokumen) dibagi target peraturan produk hukum daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan (7 dokumen), capaian yang diperoleh sebesar 271,42 % dan masuk dalam kategori ordinal “**sangat baik**.”

**Tabel III. 9 - 2**  
Perda Perkada Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021

No	PERATURAN PELAKSANAAN	JUDUL PERDA/PERGUB	KET.
1	2	3	4
1	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko	1. Perda Kepri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Perda Kepri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan 3. Pergub Nomor 33 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perizinan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan 4. Pergub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil	Penyesuaian

2	Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.	<p>1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037.</p> <p>2. Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.</p>	Penyesuaian
3	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.	Pergub Nomor 58 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan/Penyediaan Sarana Perlengkapan Jualan Bagi Usaha Mikro dan Kecil	Penyesuaian
4	Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah.	<p>1. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau.</p> <p>2. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p>	Penyesuaian

		<p>3. Pergub Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>4. Pergub Nomor 36 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Daerah</p>	
5	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.	Pergub Nomor 46 Tahun 2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi Melalui Penyedia	Penyesuaian
6	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek	Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau.	Penyesuaian
7	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.	Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037.	Penyesuaian

8	Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Perda Kepri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Penyesuaian
9	Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Perda Kepri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Ketenagalistrikan	Penyesuaian
10	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan	Pergub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil	Penyesuaian
11	Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Penyesuaian
12	Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran	Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Pergub Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	Penyesuaian

13	Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau	Penyesuaian
14	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus	<p>1. Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>2. Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p> <p>3. Pergub Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batam</p>	Penyesuaian
15	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional	Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana telah diubah dengan Pergub	Penyesuaian, khususnya terkait pemeberian

		Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pergub Nomor 51 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau	perizinan dan non perizinan dalam pelaksanaan proyek strategis Nasional
16	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037</li> <li>2. Pergub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil</li> </ol>	Penyesuaian
17	Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2037</li> <li>2. Pergub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerbitan Perizinan Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil</li> </ol>	Penyesuaian
18	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pergub Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang</li> <li>2. Pergub Nomor 28 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimum Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tanjungpinang</li> <li>3. Pergub Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis</li> </ol>	Penyesuaian

		Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi pada Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau	
19	Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	Sedang menyusun Pergub Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD berdasarkan PP

*Sumber: Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau*

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang Dilakukan Penyempurnaan Sehingga Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan, Kepentingan Umum dan atau Kesesilaan adalah tidak adanya Tenaga Penyusun Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak tersedia, dan Kekurangsiapan Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa dalam menyampaikan Ranperda yang diusulkan.

Solusi dari kendala yang dihadapi adalah melakukan koordinasi dengan BKPSDM dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk menyiapkan dan mengangkat PNS dalam Formasi Tenaga Penyusun dan Perancang untuk diikutsertakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan dan Perancangan Peraturan Perundang-undangan, dan mendorong Organisasi Perangkat Daerah pemrakarsa untuk segera melakukan Fasilitasi harmonisasi, Pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan ranperda yang akan disampaikan. Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian Sasaran Tersedianya Produk Hukum Provinsi yang Tidak Tumpang Tindih masuk kategori **“sangat baik”**.

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel III. 9 - 3**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang Dilakukan Evaluasi dan Dilakukan Penyempurnaan Sehingga Tidak Bertentangan dengan Peraturan Perundangan, Kepentingan Umum dan atau Kesusilaan

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
7	30	428.57	7	19	271,42

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian persentase Tersedianya Produk Hukum Provinsi Yang Tidak Tumpang Tindih telah melebihi target yang telah ditetapkan (target 7 dan realisasi 19), dengan persentase 271,42%. Namun angka ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terjadi penurunan, dimana pada tahun 2020, persentase capaian sebesar 428.57% (target 7 dan realisasi 30). Maka pada tahun 2021 terjadi penurunan persentase capaian sebesar 157,15%. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2021 capaian kinerja pada sasaran Tersedianya Produk Hukum Provinsi Yang Tidak Tumpang Tindih berada dalam kategori “**sangat baik**” karena lebih dari 100%.

## 10. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Tabel III. 10 - 1

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan  
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sasaran Strategis 10				
Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021		
		Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	100%	100%	100

### Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pelayanan kedinasan kepala daerah yang dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau berupa pelayanan kepada gubernur dan wakil gubernur dalam hal kunjungan kerja gubernur baik di dalam daerah maupun di luar daerah yang berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP). Untuk tahun 2020 target yang ditetapkan adalah pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kepulauan Riau sebesar 100%. Capainnya diukur dari jumlah kegiatan KDH/WKDH yang sesuai dengan SOP dibagi total kegiatan KDH/WKDH yang sesuai SOP dikali 100. Saat ini dalam pelaksanaan kegiatan, SOP peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 4 SOP yakni:

1. SOP Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala Daerah,
2. SOP Kunjungan Kerja/ Inspeksi Wakil Kepala Daerah,
3. SOP Fasilitasi Kegiatan Harian Kepala Daerah dan
4. SOP Fasilitasi Kegiatan Harian Wakil Kepala Daerah.

Untuk mencapai target indikator tersebut didukung melalui 3 (tiga) kegiatan, yaitu:

- a. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; dan
- c. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan.

Dilihat dari target pada tahun 2021 yakni sebesar 100% (target penerapan 4 SOP dari total 4 SOP). Maka setelah dilakukan perhitungan didapati realisasi adalah sebesar 100%, hal ini disebabkan oleh semua SOP yang ada telah diterapkan pada pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga capaian di tahun 2021 sebesar 100% masuk kategori “**baik**.”

Dalam mencapai Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan KDh dan WKDh tidak ditemukan kendala ataupun permasalahan yang berarti. Kinerja untuk mencapai sasaran dapat terpenuhi apabila kepala daerah/ wakil kepala daerah aktif bertugas. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp6.690.704.800 dengan anggaran terealisasi sebesar Rp2.271.783.055 (33.95%). Anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah sebesar Rp11.318.132.550,00 dengan anggaran terealisasi Rp10.500.594.452,00 (92.78%). Anggaran untuk kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan sebesar Rp1.339.639.800,00 dengan anggaran terealisasi Rp1.164.938.286,00 (86.96%). Rata-rata realisasi fisik dari kegiatan tersebut mencapai 100%.

Realisasi dan Capaian Kinerja pada tahun 2021 ini jika dibandingkan dengan tahun 2020 maka dapat dilihat pada berikut:

**Tabel III. 10- 2**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai SOP

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100	100%	100%	100

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021, capaian yang didapat masing-masing adalah 100%, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## 11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah

**Tabel III. 11 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum di Lingkungan Sekretariat Daerah

Sasaran Strategis 11					
Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Capaian (%)
		Target	Realisasi		
1	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	100%	100%		100

### Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP

Pelaksanaan pelayanan Umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP adalah penyediaan pelayanan kebutuhan umum di lingkungan Sekretariat

Daerah yang berpedoman pada standar operasional prosedur (SOP). Pada tahun 2021 target yang ditetapkan adalah 100% pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah yang sesuai dengan SOP. Capaiannya diukur dari jumlah SOP pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah SOP pelayanan umum yang ada dikali 100. Saat ini pada pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah terdiri dari 5 SOP, diantaranya adalah:

1. SOP penyediaan BBM dan kebutuhan kendaraan dinas jabatan,
2. SOP rutinitas Gedung daerah dan wisma daerah,
3. SOP penyediaan jasa transportasi,
4. SOP penyediaan jasa sewa sarana perkantoran/ruang/tempat/gedung perkantoran,
5. SOP fasilitas dan utilitas gedung kantor, kendaraan dinas dan operasional.

Untuk mencapai target indikator tersebut didukung melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- a. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- b. dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Guna pelaksanaan kegiatan tersebut besaran anggaran untuk kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah sebesar Rp25.800.627.990,00 dengan anggaran terealisasi sebesar Rp25.466.023.744,00 (98.70%). Anggaran untuk kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp31.621.749.150,00 dengan anggaran terealisasi sebesar Rp29.705.384.890,00 (93.94%).

Dilihat dari target tahun 2021 sebesar 100% (target penerapan 5 SOP dari total 5 SOP). Maka didapat realiasi sebesar 100%, disebabkan oleh semua SOP telah dilaksanakan sehingga capaian di tahun 2021 sebesar 100% masuk kategori “**baik**.”

Permasalahan dalam mencapai Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Umum di lingkungan Setda adalah manfaat kualitas pelayanan umum belum sepenuhnya dapat dinikmati oleh penerima manfaat layanan di lingkungan Setda secara merata. Di masa mendatang agar kinerja kualitas pelayanan umum menjadi lebih baik, perlu disosialisasikan SOP dimaksud di lingkungan Sekretariat

Daerah agar pelayanan yang diterima lebih optimal.

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel III. 11 - 2**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100	100%	100%	100

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021, capaian yang didapat masing-masing adalah 100%, sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan sasaran kinerja meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## **12. Sasaran Terkelola dan Terpeliharanya Aset Milik Sekretariat Daerah Secara Tertib dan Transparan**

**Tabel III. 12 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Terkelola dan Terpeliharanya Aset Milik Sekretariat Daerah Secara Tertib dan Transparan

Sasaran Strategis 12					
Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan					
No.	Indikator Kinerja	Tahun 2021			
		Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	100%	100%	100	

## **Persentase Aset Milik Sekretariat Daerah yang Terjamin Keamanannya**

Aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya adalah aset yang dikelola dan dipelihara oleh Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kepulauan Riau yang dijamin keamanannya atas administrasi (pencatatan aset di Buku Inventaris, Kartu Inventaris Barang), fisik/keberadaan aset, dan legalitas hukum/bukti kepemilikan aset. Bentuk legalitas hukum aset berupa pemberian asuransi, pembayaran pajak, dan perawatan yang baik secara berkala.

Untuk Tahun 2021 target yang ditetapkan adalah aset milik Sekretariat Daerah Provinsi Kepri yang terjamin keamanannya 100%. Capaiannya diukur dari jumlah aset Sekretariat Daerah yang dikelola dan dipelihara dibagi jumlah total aset di Sekretariat Daerah dikali 100. Aset milik Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang diukur merupakan aset Tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan proses rekonsiliasi barang Setda tahun 2021 belum selesai. Data final jumlah aset tahun 2021 baru dapat diperoleh pada akhir triwulan I Tahun 2022.

Tahun 2021 (data jumlah aset yang digunakan adalah jumlah aset Tahun 2020), realiasi persentase aset milik Setda adalah 100% atau sebanyak 36.019 aset dari target 36.019 aset yang dimiliki Setda. Jumlah aset Setda berubah setiap tahun diakibatkan penghapusan sejumlah aset akibat rusak, tidak layak pakai, dan sudah kadaluarsa sehingga aset tidak dapat digunakan lagi, dan juga akibat pemindahan kepemilikan aset berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Indikator kinerja Persentase Aset Milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya Tahun 2021 indikator tersebut telah tercapai sesuai target. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 12 - 2**

Capaian Kinerja Indikator Persentase Aset Milik  
Sekretariat Daerah yang Terjamin Keamanannya

Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Kinerja Akhir RPJMD	Target Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Capaian Tahun 2021 (%)	Status Capaian Tahun 2021
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Aset Milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	%	100	100	100	100	Tercapai

Dari tabel diatas tampak bahwa dari target tahun 2021 sebesar 100% dengan target penerapan 4 SOP dari total 4 SOP. Maka akan didapat realiasi sebesar 100%, hal ini disebabkan oleh semua SOP telah ada telah diterapkan sehingga capaian di tahun 2021 sebesar 100% masuk kategori “**baik**.”

Untuk mencapai target indikator tersebut didukung melalui 2 (dua) kegiatan, yaitu:

- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; dan
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut besaran anggaran yang ditetapkan untuk kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah adalah sebesar Rp1.339.539.092,00 dengan anggaran terealisasi sebesar Rp1.298.921.716,00 (96.97%). Anggaran untuk kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp22.703.121.140,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.153.393.598,00 (97.58%).

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel III. 12 - 3**

Perbandingan Target Kinerja dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Aset Milik Sekretariat Daerah yang Terjamin Keamanannya

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
100% (36.019 aset)	100% (36.019 aset)	100	100% (36.019 aset)	100%* (36.019 aset)	100%

\*Realisasi Tahun 2020 sehubungan belum selesaiya rekonsiliasi barang milik Setda Tahun 2021

Merujuk pada tabel diatas, tampak bahwa capaian kinerja tahun 2021 telah mencapai 100% dan tidak berubah jika dibandingkan dengan tahun 2020 (100%). Namun secara keseluruhan, pada tahun 2021 jumlah tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa capaian kinerja telah tercapai dan termasuk kategori baik.

### **13. Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan**

**Tabel III. 13 - 1**

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan

<b>Sasaran Strategis 13</b>				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>		
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	100% (600 orang)	100%	100
2	Persentase santri yang menjadi hafiz	100% (5000 orang)	25%* (1.250 orang)	25
<b>Capaian rata-rata (%)</b>				<b>62,5</b>

Ket.: \*Realisasi Tahun 2019

#### **Persentase Mubaligh yang Tersertifikasi**

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan Iman dan Taqwa masyarakat adalah dengan memperbanyak pegiat-pegawai agama yang senantiasa melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam kehidupan beragama di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini bertujuan untuk membentuk cara pandang dan standar berdakwah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dilakukannya pembinaan kepada pendakwah yang mensyarkan nilai-nilai keagamaan (mubaligh) yang berupa pelatihan-pelatihan kepada remaja-remaja masjid adalah agar Da'i dapat menyampaikan syiar agama sesuai standar dakwah di Kepri. Da'i yang lulus pelatihan akan diberikan sertifikat sebagai penghargaan bahwa mereka sudah mendapat pelatihan dari Pemerintah Provinsi Kepri.

Persentase mubaligh yang tersertifikasi diukur dengan cara jumlah mubaligh yang tersertifikasi dibagi dengan jumlah mubaligh yang dibina dikali seratus. Di tahun 2021, capaian persentase mubaligh yang bersertifikasi mencapai 100%. Berdasarkan skala pengukuran ordinal, capaian Sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-Nilai Keagamaan masuk kategori “**baik**”. Dibanding dengan capaian persentase mubaligh yang tersertifikasi tahun 2020 jumlah mubaligh yang tersertifikasi mengalami peningkatan.

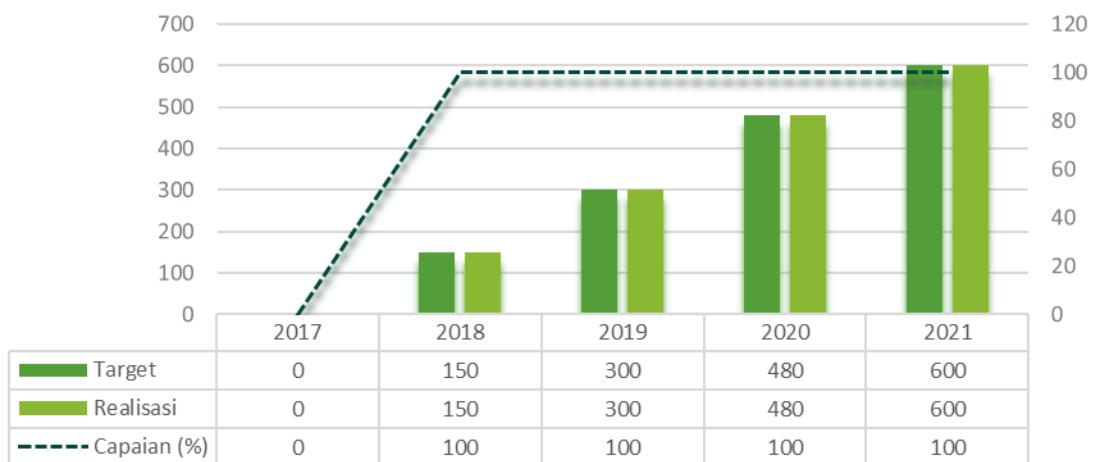
Dari target 600 mubaligh yang dibina sampai dengan tahun 2021, sebanyak 120 mubaligh sudah tersertifikasi pada tahun 2020 sehingga sampai dengan tahun 2020 jumlah mubaligh yang telah tersertifikasi sebesar 600 orang. Hal ini menunjukkan pencapaian target tahun 2021 telah memenuhi target tahunan. Namun demikian, bila dibandingkan dengan target 2021 (akhir RPJMD), capaian 2021 memiliki nilai persentase kumulatif sebanyak 600 orang atau sebesar 100%.

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel III. 13 - 2**  
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja  
Persentase Mubaligh yang tersertifikasi

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
80%	80%	100	100%	100%	100

**Gambar III. 13 - 1**  
**Capaian Mubaligh yang Tersertifikasi**



Kendala dan permasalahan dalam mencapai indikator persentase mubaligh yang tersertifikasi adalah terbatasnya anggaran dengan frekuensi jumlah mubaligh yang tersebar di 7 Kabupaten dan Kota sehingga mengakibatkan waktu penyelenggaraan, jumlah peserta yang kurang merata dan pemateri kurang optimal dalam menyikapi berbagai permasalahan yang berbeda-beda antara satu kondisi dengan kondisi lain karena perbedaan wilayah dan karakteristik masyarakat.

Berkenaan dengan hal tersebut, guna perbaikan kinerja di masa mendatang, perlu dilakukan penyesuaian anggaran dan lokasi pelaksanaan untuk melakukan pemetaan kondisi dan masalah yang terjadi antar daerah sehingga waktu pelaksanaan serta pola penyampaian materi lebih optimal, misalnya dengan melakukan kegiatan di tiap daerah sehingga karakteristik permasalahan mendapatkan solusi yang lebih tepat dan lebih akurat.

#### **Persentase Santri yang Menjadi Hafiz**

Pembinaan terhadap santri-santri untuk menghafal Al-Qur'an merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Iman dan Taqwa. Hafiz adalah orang yang memiliki kemampuan menghafal Al-Qur'an yang dapat dibuktikan dan diuji kemampuan hafalan Al-Quran yang dikuasainya. Pembuktian atas kemampuan

santri dalam menghafal Al-Qur'an, maka santri dimaksud dikukuhkan dalam suatu prosesi wisuda yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Persentase santri yang menjadi hafiz diukur dengan cara jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi dengan jumlah santri di Provinsi Kepulauan Riau dikali seratus.

Pada tahun 2021, capaian persentase santri yang menjadi hafiz tidak mencapai target. Jumlah hafiz yang diwisuda tahun 2021 adalah 0 (nol) orang. Hal ini menunjukkan pencapaian target tahun 2021 tidak mencapai target tahunan. Dibandingkan dengan capaian tahun 2020, capaian indikator persentase hafiz yang diwisuda tahun 2021 tidak mengalami perubahan. Tahun 2021 capaian indikator dimaksud sebesar 25% (mengikuti capaian tahun 2019). Dengan demikian indikator persentase hafiz yang diwisuda tahun 2021 lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2019 dan sama dengan tahun 2020. Dari target 5.000 santri yang diwisuda sampai dengan tahun 2021, sebanyak 1.250 santri sudah diwisuda sampai dengan tahun 2021 atau sebesar 25%. Dengan demikian, sebanyak 3.750 santri atau sebesar 75% tidak dapat dicapai sampai akhir periode 2021. Dengan demikian maka capaian pada indikator Indikator Kinerja Persentase Santri yang Menjadi Hafiz adalah 25% dan termasuk dalam kategori "**kurang baik**".

Realisasi dan Capaian Kinerja tahun 2021 jika dibandingkan dengan tahun 2020 dapat dilihat pada berikut:

**Tabel III. 13 - 3**  
 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja  
 Persentase Santri yang Menjadi Hafiz

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
80% (480 orang)	25%* (1.250 orang)	31,25	100% (5000 orang)	25%* (1.250 orang)	25

Ket.: \*Realisasi Tahun 2019

**Gambar III. 13 - 2**  
**Persentase Santri yang Menjadi Hafiz**



Permasalahan dalam mencapai target persentase santri yang menjadi hafiz adalah tidak tersedianya anggaran yang memadai sehingga tidak dapat mendukung pencapaian indikator dimaksud di tahun 2021 ditambah dengan kondisi pandemic covid 19 yang terjadi saat ini. Untuk capaian sasaran kinerja persentase santri yang menjadi hafiz sebesar 20% secara tahunan belum memenuhi target yang di tetapkan begitu juga target RPJMD sebesar 100%. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan terhadap kebutuhan dana dalam pelakasanaan yang sangat tinggi dalam mencapai target santri yang menjadi hafiz melalui pelaksanaan wisuda 1000 santri se-Provinsi kepulauan Riau.

Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan merubah konsep kegiatan yang mana pada awalnya dalam bentuk penyelenggaraan wisuda santri menjadi pendataan santri yang menjadi hafiz melalui kegiatan monitoring dan evaluasi. Hal ini dilaksanakan mengingat setiap kabupaten dan kota setiap tahunnya menyelenggarakan wisuda santri sebagai indikator untuk menjadi hafiz pada berbagai tingkatan juz maupun instansi lembaga pendidikan Al-Quran (Kementerian Agama, Kecamatan, Sekolah Islam dan Pondok Pesantren). Namun pada kenyataannya pada tahun 2021 hal tersebut juga tidak dapat terlaksana karena masih dalam situasi pandemic Covid-19.

Berdasarkan persentase capaian indikator dan penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Nilai-nilai Keagamaan dinilai cukup efisien. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata persentase capaian indikator persentase mubaligh yang tersertifikasi (100 %) mendekati persentase realisasi anggaran (91,24%). Pencapaian sasaran ini didukung oleh Progam Kesejahteraan Rakyat dengan realisasi sebesar Rp 442.240.040.401 (98,63%) dari pagu program sebesar Rp. 448.375.134.772.

#### **14. Meningkatnya Akses Pelayanan Umum dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan**

**Tabel III. 14 - 1**

Capaian Kinerja Kinerja Sasaran Strategis Meningkatnya Akses Pelayanan Umum dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan

<b>Sasaran Strategis 14</b>				
Meningkatnya Akses Pelayanan Umum dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan				
<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Tahun 2021</b>		
		<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
1	Persentase Media Massa yang menyiarluaskan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	100	100	100

#### **Persentase Media Massa yang Menyiarkan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**

Persentase media massa yang menyiarluaskan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan perbandingan antara jumlah media massa (baik media massa

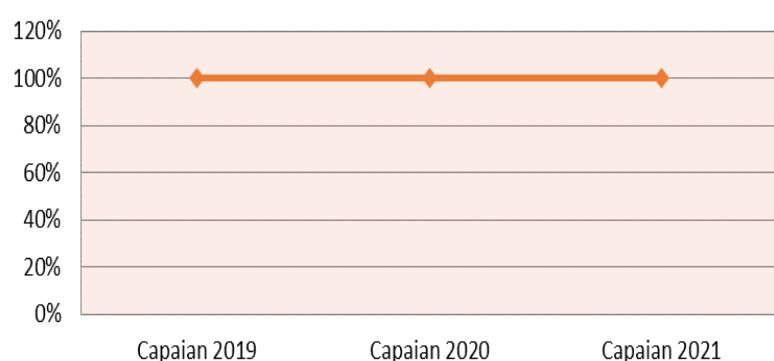
nasional/lokal, harian, mingguan, *online*, maupun elektronik) yang menyiarakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan jumlah media yang bekerjasama dengan Biro Humas Protokol dan Penghubung.

Pada tahun 2021, terdapat 222 media massa yang telah melakukan kerjasama dengan Biro Humas, Protokol dan Penghubung. Dari jumlah tersebut seluruh media massa telah melakukan penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga jika dikalkulasikan dengan pengertian bahwa jumlah media yang menyiarakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 222 media massa dibagi dengan jumlah media massa yang bekerjasama dengan Biro Humas Protokol dan Penghubung sebanyak 222 media massa, maka akan didapat hasil persentase 100%.

Dengan jumlah tersebut, maka dari hasil evaluasi media massa yang menyiarakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dari target 100% dapat terealisasi sebesar 100% sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja “**baik**.”

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja persentase media massa yang menyiarakan kegiatan pemerintah provinsi kepulauan riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah dari tahun 2019-2021:

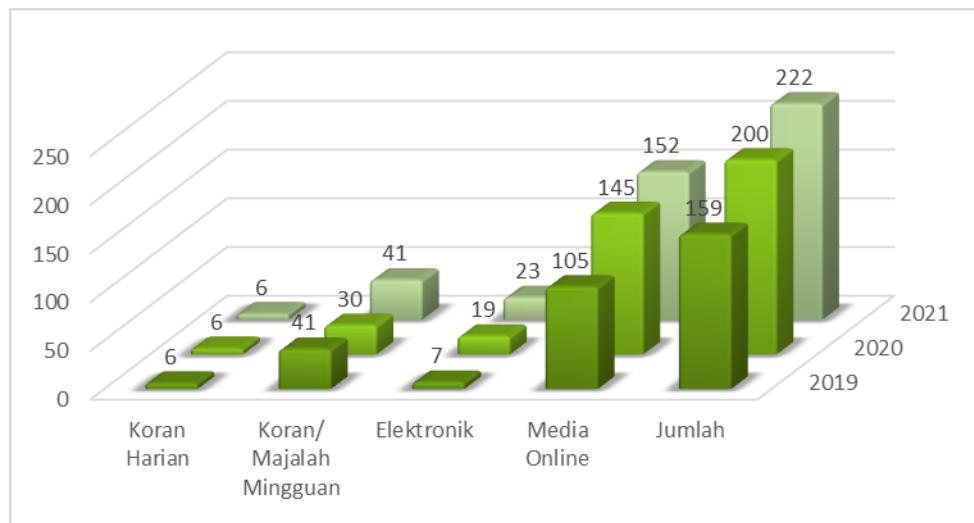
**Gambar III. 14 - 1**  
Pencapaian Kinerja Tahun 2019-2021



Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa capaian persentase media massa yang menyiarakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah tetap 100%.

Perbandingan jumlah media massa ini dengan tahun sebelumnya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut: :

**Gambar III. 14 - 2**  
Jenis Media Massa yang Berkerjasama dengan  
Biro Humas, Protokol dan Penghubung Tahun 2019-2021



**Gambar III. 14 - 3**  
Jumlah Media Massa yang Berkerjasama dengan  
Biro Humas, Protokol dan Penghubung Tahun 2019-2021



Jumlah media massa yang bekerjasama dengan Biro Humas, Protokol dan Penghubung yang menyiarakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya mengalami perubahan, tergantung pada banyaknya proposal dari berbagai media massa (baik media massa nasional/lokal, harian, mingguan, *online*, maupun elektronik) yang mengajukan kerjasama dan dari hasil verifikasi yang dilakukan Biro Humas, Protokol dan Penghubung terhadap media-media yang ada.

Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka didapat data perbandingan sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III. 14 - 2**

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja pada Indikator Kinerja Persentase Media Massa yang menyiarakan kegiatan Pemprov. Kepri Dalam Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tahun 2020			Tahun 2021		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
100%	100%	100	100%	100%	100

Pencapaian tersebut dapat pula digambarkan pada grafik di bawah ini:

**Gambar III. 14 - 4**

Perbandingan Akhir Periode Renstra dan Realisasi Kinerja Sasaran



Tingkat kemajuan sasaran strategis persentase media massa yang menyiarakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah, sudah diperoleh tingkat kemajuan sebesar 100% dari target akhir renstra tahun 2021 sebesar 100%.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian sasaran strategis tersebut diatas, adalah sebesar Rp55.037.727,00 atau 99,55% dari total anggaran sebesar Rp55.295.421.578,00. Hal ini berarti terdapat efisiensi penggunaan sumber daya keuangan sebesar 0,45% dari anggaran yang ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran persentase media massa yang menyiarakan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesungguhnya tidak terlepas dari pelaksanaan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan dengan Sub Kegiatan:
  - a. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan;
  - b. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Biro Humas, Protokol dan Penghubung Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 2 (Dua) program yang bersifat pendukung operasional yaitu:

1. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah;
2. Program Pelayanan Penghubung.

## B. Realisasi Anggaran

Serapan anggaran seluruh program yang mendukung keseluruhan Sasaran Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021 (sebanyak 14 sasaran strategis) adalah sebesar 92,64%, yakni jumlah yang terealisasi adalah Rp647.258.323.026 dari total pagu Rp678.491.352.983. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel III. 2**  
**Realisasi Program/Sasaran**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021**

No.	Program/ Sasaran	Pagu	Realiasi Anggaran	Serapan Anggaran (%)
1	2	3	4	5
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	Rp221.484.179.161	Rp197.741.500.481	89,28
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp11.318.132.550	Rp10.500.594.452	92,78
2	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	Rp132.601.421.393	Rp110.691.651.514	83,48
3	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	Rp24.042.660.232	Rp23.184.979.795	96,43
4	Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	Rp53.521.964.986	Rp53.364.274.720	99,71

<b>2</b>	<b>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Rp1.382.658.800</b>	<b>Rp1.192.375.226</b>	<b>86,24</b>
1	Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN	Rp1.382.658.800	Rp1.192.375.226	86,24
<b>3</b>	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	<b>Rp1.077.549.900</b>	<b>Rp1.069.260.246</b>	<b>99,23</b>
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	Rp1.077.549.900	Rp1.069.260.246	99,23
<b>4</b>	<b>Program Perekonominian dan Pembangunan</b>	<b>Rp969.452.350</b>	<b>Rp929.081.851</b>	<b>95,84</b>
1	Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Rp573.264.500	Rp540.529.719	94,29
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Rp396.187.850	Rp388.552.132	98,07
<b>5</b>	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Rp3.743.706.800</b>	<b>Rp2.821.366.686</b>	<b>75,36</b>
1	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	Rp3.743.706.800	Rp2.821.366.686	75,36

<b>6</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp448.375.134.772</b>	<b>Rp442.240.040.401</b>	<b>98,63</b>
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Rp448.375.134.772	Rp442.240.040.401	98,63
<b>7</b>	<b>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp777.543.000</b>	<b>Rp593.663.557</b>	<b>76,35</b>
1	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan	Rp777.543.000	Rp593.663.557	76,35
<b>8</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>Rp681.128.200</b>	<b>Rp671.034.578</b>	<b>98,52</b>
1	Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur	Rp52.352.900	Rp52.079.650	99,48
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau	Rp384.620.100	Rp378.074.828	98,30
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp244.155.200	Rp240.880.100	98,66
<b>Jumlah</b>		<b>Rp678.491.352.983</b>	<b>Rp647.258.323.026</b>	<b>92,64*</b>

Ket. : \*Rata-rata serapan anggaran

Di sisi lainnya, anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja Sekretariat Daerah tahun 2021 adalah efisien. Dibandingkan realisasi anggaran sebesar 92,64% (Rp647.258.323.026 dari total pagu Rp678.491.352.983) maka tingkat efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah 7,36%. Efisiensi penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 3**  
**Tingkat Efisiensi**  
**Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021**

No.	Program/ Sasaran	Pagu	Realiasi Anggaran	Selisih Anggaran	Persentase Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>	<b>Rp221.484.179.161</b>	<b>Rp197.741.500.481</b>	<b>Rp23.742.678.680</b>	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Rp11.318.132.550	Rp10.500.594.452	Rp817.538.098	7,22
2	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	Rp132.601.421.393	Rp110.691.651.514	Rp21.909.769.879	16,52
3	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	Rp24.042.660.232	Rp23.184.979.795	Rp857.680.437	3,57
4	Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	Rp53.521.964.986	Rp53.364.274.720	Rp157.690.266	0,29

No.	Program/ Sasaran	Pagu	Realiasi Anggaran	Selisih Anggaran	Persentase Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
2	<b>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</b>	Rp1.382.658.800	Rp1.192.375.226	Rp190.283.574	
	1 Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN	Rp1.382.658.800	Rp1.192.375.226	Rp190.283.574	13,76
3	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>	Rp1.077.549.900	Rp1.069.260.246	Rp8.289.654	
	1 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	Rp1.077.549.900	Rp1.069.260.246	Rp8.289.654	0,77
4	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>	Rp969.452.350	Rp929.081.851	Rp40.370.499	
	1 Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Rp573.264.500	Rp540.529.719	Rp32.734.781	5,71
	2 Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Rp396.187.850	Rp388.552.132	Rp7.635.718	1,93
5	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi</b>	Rp3.743.706.800	Rp2.821.366.686	Rp922.340.114	

No.	Program/ Sasaran	Pagu	Realiasi Anggaran	Selisih Anggaran	Persentase Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
	<b>Hukum</b>				
1	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	Rp3.743.706.800	Rp2.821.366.686	Rp922.340.114	24,64
<b>6</b>	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Rp448.375.134.772</b>	<b>Rp442.240.040.401</b>	<b>Rp6.135.094.371</b>	
1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Rp448.375.134.772	Rp442.240.040.401	Rp6.135.094.371	1,37
<b>7</b>	<b>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>Rp777.543.000</b>	<b>Rp593.663.557</b>	<b>Rp183.879.443</b>	
1	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan	Rp777.543.000	Rp593.663.557	Rp183.879.443	23,65
<b>8</b>	<b>Program Penataan Organisasi</b>	<b>Rp681.128.200</b>	<b>Rp671.034.578</b>	<b>Rp10.093.622</b>	
1	Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur	Rp52.352.900	Rp52.079.650	Rp273.250	0,52
2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi	Rp384.620.100	Rp378.074.828	Rp6.545.272	1,70

No.	Program/ Sasaran	Pagu	Realiasi Anggaran	Selisih Anggaran	Persentase Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
	dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau				
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rp244.155.200	Rp240.880.100	Rp3.275.100	1,34
<b>Jumlah</b>		<b>Rp678.491.352.983</b>	<b>Rp647.258.323.026</b>	<b>Rp31.224.740.303</b>	<b>7,36*</b>

Ket. : \*Rata-rata persentase efisiensi

Dibandingkan realisasi anggaran program Tahun 2020 sebesar 96.88% (Rp193.888.759.564,23 dari total pagu Rp199.920.804.667,12), maka realisasi anggaran program tahun 2021 lebih rendah dari tahun 2020. Namun realisasi tersebut sama-sama menunjukkan efisiensi penggunaan dana dari tahun sebelumnya.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada tahun anggaran 2021 pencapaian 14 Sasaran Strategis dan 16 Indikator Kinerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun secara umum telah termasuk dalam kategori “baik” dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 104,76%.

Terdapat 2 indikator kinerja dengan kategori “sangat baik” yakni pada indikator kinerja “Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau” dengan capaian 106,069%, (realisasi 92,28% dari target 87%), dan angka ini juga naik dari tahun sebelumnya yang realisasi capaianya sebesar 104,3%. Kemudian pada indikator “Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan” dengan capaian 271,429% (realisasi 19 dari 7 target), meskipun jika dibandingkan dari tahun sebelumnya persentase capaian ini mengalami penurunan.

Terdapat 3 indikator kinerja yang termasuk dalam kategori “cukup baik” yaitu indikator kinerja “Skor rata – rata tingkat kesehatan BUMD” sebesar 74,07%, “Peringkat LPPD Provinsi” sebesar 65,71%, “Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah” sebesar 65,71%. Kemudian terdapat 1 indikator kinerja yang termasuk kategori “kurang baik” yaitu indikator kinerja “Persentase santri yang menjadi hafiz” sebesar 25%.

Kendala dan permasalahan pada indikator kinerja yang memiliki capaian “cukup baik” dan “kurang baik” antara lain:

1. ketersediaan anggaran BUMD serta manajemen dalam pengelolaan BUMD;
2. belum optimalnya koordinasi dalam penyajian data dalam penyusunan LPPD; dan
3. tidak optimalnya anggaran untuk mendukung kegiatan santri menjadi hafiz.

## **B. Strategi Peningkatan Kinerja**

Adapun strategi pada indikator kinerja yang memiliki capaian “cukup baik” dan “kurang baik” dalam meningkatkan kinerja pada masa mendatang antara lain:

1. Mengoptimalkan koordinasi dalam penyajian data yang dilakukan oleh OPD sebagai Tim Penyusun LPPD untuk menjadikan LPPD sebagai bentuk akuntabilitas kinerja penyelenggara Pemerintah Daerah;
2. Pemenuhan modal kerja BUMD, Penyelesaian Hutang BUMD dan Pemilihan pengurus BUMD secara profesional (direksi, dewan komisaris/dewan pengawas) (dengan menyesuaikan indikator kinerja pada Renstra Tahun 2021-2026); dan
3. Merubah konsep kegiatan yang mana pada awalnya dalam bentuk penyelenggaraan wisuda santri menjadi pendataan santri yang menjadi hafiz melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (dengan menyesuaikan indikator kinerja pada Renstra Tahun 2021-2026).

# **LAMPIRAN**

**LAMPIRAN A**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. LAMIDI, M.M**

Jabatan : **Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, November 2021

**Pihak Kedua,**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M**

**Pihak Pertama,**

**PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



**Ir. LAMIDI, M.M**  
NIP. 19620626 199003 1 008



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Fisik 100%, Keuangan 95%
2	Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	8
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Skor rata - rata tingkat kesehatan BUMD	45
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	Peringkat LPPD Provinsi Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tinggi 100%
5	Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	100%
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau	Nilai /Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	75
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	B
8	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	87%
9	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	7
10	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	100%
11	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	100%
12	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	100%
13	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi Persentase santri yang menjadi hafiz	100%
14	Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase media massa yang menyiarluaskan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%

No.	Program		Anggaran	Ket
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp	249,363,019,995	P-APBD
2	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp	1,382,658,800	P-APBD
3	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp	1,852,881,600	P-APBD
4	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp	690,221,150	P-APBD
5	Program Pengelolaan Perbatasan	Rp	547,022,250	P-APBD
6	Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp	969,452,350	P-APBD
7	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp	3,743,706,800	P-APBD
8	Program Pelayanan Penghubung	Rp	1,773,456,592	P-APBD
9	Program Kesejahteraan Rakyat	Rp	448,375,134,772	P-APBD
10	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp	777,543,000	P-APBD
11	Program Penataan Organisasi	Rp	1,033,671,500	P-APBD
12	Program Kepegawaian Daerah	Rp	132,692,500	P-APBD

Tanjungpinang, November 2021

Pihak Kedua,

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E, M.M

Pihak Pertama,

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Ir. LAMIDI, M.M  
NIP. 19620626 199003 1 008

**LAMPIRAN B**  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN 2021**



**PERJANJIAN KINERJA**  
**TAHUN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si**  
Jabatan : **Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau**  
selanjutnya disebut **pihak pertama**

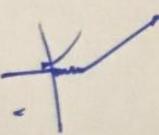
Nama : **H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**  
Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Maret 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

  
**H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.**

**PIHAK PERTAMA,**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

  
  
**Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si**  
**NIP. 19660216 198602 1 003**

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021**  
**SEKRETARIAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN	Persentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Fisik 100%, Keuangan 95%
2	Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	8
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Skor rata – rata tingkat kesehatan BUMD	45
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	Peringkat LPPD Provinsi Persentase Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Tinggi 100%
5	Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur	Persentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	100%
6	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau	Nilai /Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	75
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepulauan Riau	B
8	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	87%
9	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	7
10	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	100%
11	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	100%
12	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
13	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	100%
		Persentase santri yang menjadi hafiz	100%
14	Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	Persentase media massa yang menyiarkan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 262.429.114.223	APBD
2. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Rp. 2.387.944.975	APBD
3. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Rp. 2.575.576.750	APBD
4. Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 769.875.150	APBD
5. Program Pengelolaan Perbatasan	Rp. 609.427.250	APBD
6. Program Perekonomian dan Pembangunan	Rp. 1.132.102.800	APBD
7. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Rp. 3.994.197.250	APBD
8. Program Pelayanan Penghubung	Rp. 1.996.823.892	APBD
9. Program Kesejahteraan Rakyat	Rp. 89.843.438.272	APBD
10. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Rp. 1.328.968.700	APBD
11. Program Penataan Organisasi	Rp. 3.772.007.200	APBD
12. Program Kepegawaian Daerah	Rp. 293.850.000	APBD

Tanjungpinang, Maret 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

**PIHAK PERTAMA,**  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660216 198602 1 003

**LAMPIRAN C**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
SEKRETARIAT DAERAH**  
PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU ISTANA KOTA PIRING  
GEDUNG SULTAN MAHMUD RIAYAT SYAH  
**TANJUNGPINANG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 510 /KPTS-1.6/TI /2018**

**TENTANG**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang :** a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau

Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);

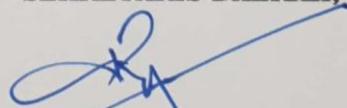
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 394);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 437);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Pada Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 5 Januari 2018

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si  
NIP. 19660216 198602 1 003**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  5. Kepala Biro Organisasi dan KORPRI Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
  6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau  
Nomor : 510/KPTS-1.6/I/2018  
Tanggal : 5 Januari 2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

1. Nama Organisasi : Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
3. Fungsi :
  - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
  - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
  - d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
  - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya capaian penyeraapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Persentase realisasi keuangan dan fisik APBD dan APBN sesuai target	%	Persentase Realisasi Fisik dan Keuangan dibagi Persentase Target Fisik dan Keuangan dikali 100	Biro Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
2	Meningkatnya Rekomendasi Bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi di Bidang Perekonomian yang ditindaklanjuti	Rekomendasi	Jumlah rekomendasi kebijakan di bidang perekonomian yang dihasilkan	Biro Administrasi Perekonomian	Biro Administrasi Perekonomian
3	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	Skor rata-rata tingkat kesehatan BUMD	Skor	Jumlah BUMD yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan serta dinyatakan	Biro Administrasi Perekonomian	Biro Administrasi Perekonomian

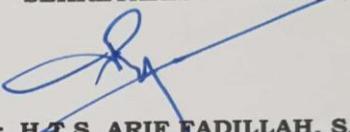
				sehat dibagi Total Jumlah BUMD yang ada di Provinsi Kepulauan Riau dikali 100		
4	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan daerah yang akuntabel	Peringkat LPPD provinsi	Peringkat	Peringkat LPPD Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri	Kementerian Dalam Negeri	Biro Pemerintahan dan Perbatasan
		Persentase penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah	%	Realisasi Skor PPD dibagi Target Skor PPD dikali 100	Biro Pemerintahan dan Perbatasan	Biro Pemerintahan dan Perbatasan
5	Terwujudnya organisasi pemerintah Provinsi Kepri yang tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	Persentase perangkat daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	%	Jumlah OPD yang Tertata Kelembagaannya dibagi Jumlah Total OPD dikali 100	Biro Organisasi dan KORPRI	Biro Organisasi dan KORPRI
6	Meningkatnya nilai reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja Provinsi Kepulauan Riau	Nilai/Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Nilai/Indeks	Nilai Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan oleh Kementerian PAN dan RB	Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi dan KORPRI
7	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik organisasi	Indeks	Nilai/Indeks Kepuasan Masyarakat	Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Biro Organisasi dan KORPRI

		perangkat daerah Provinsi Kepulauan Riau			Reformasi Birokasi	
8	Terwujudnya pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip-prinsip pengadaan	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	%	Jumlah paket proyek yang dilaksanakan pengadaan barang/jasanya tepat waktu dibagi jumlah total paket proyek Pemprov. Kepri dikali 100	Biro Administrasi Layanan Pengadaan	Biro Administrasi Layanan Pengadaan
9	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Dokumen	Jumlah Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	Biro Hukum	Biro Hukum

10	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	%	Jumlah kegiatan KDH/WKDH yang sesuai dengan SOP dibagi Total kegiatan KDH/WKDH yang sesuai dengan SOP dikali 100	Biro Umum	Biro Umum
11	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	%	Jumlah SOP pelayanan umum yang sudah dilaksanakan dibagi jumlah SOP pelayanan umum yang ada dikali 100	Biro Umum	Biro Umum
12	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	%	Jumlah aset di Sekretariat Daerah yang dikelola dan dipelihara dibagi jumlah total aset di Sekretariat Daerah dikali 100	Biro Umum	Biro Umum
13	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	Persentase mubaligh yang tersertifikasi	%	Jumlah mubaligh yang lulus kompetensi dibagi mubaligh yang dibina dikali 100	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase santri yang menjadi hafiz	%	Jumlah santri yang menjadi hafiz dibagi jumlah santri di kepulauan riau dikali 100	Biro Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
14	Meningkatnya akses pelayanan	Persentase media massa	%	Jumlah media yang menyiarakan	Biro Humas, Protokol	Biro Humas, Protokol

	umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	yang menyiarkan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dalam Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dibagi Jumlah media yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dikali 100	dan Penghubung	dan Penghubung
--	-------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------	----------------

a.n. **GUBERNUR KEPULAUAN RIAU  
SEKRETARIS DAERAH,**



**Dr. H.T.S. ARIF FADILLAH, S.Sos, M.Si  
NIP.19660216 198602 1 003**

**LAMPIRAN D**  
**CAPAIAN KINERJA**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2021**

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status				
1	2	3	4	5	6				
<b>Sasaran Strategis 1:</b>									
Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN									
1	Percentase realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN sesuai target	Fisik 100%	Fisik 100%	100	Baik				
		Keuangan 95%	Keuangan 86.24%	90,77	Baik				
<b>Capaian Sasaran 1</b>				<b>95,39</b>	<b>Baik</b>				
<b>Sasaran Strategis 2:</b>									
Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti									
1	Jumlah rekomendasi kebijakan dibidang perekonomian yang dihasilkan	8	8	100	Baik				
		<b>Capaian Sasaran 2</b>			<b>100</b>				
<b>Sasaran Strategis 3:</b>									
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD									
1	Skor rata – rata tingkat kesehatan BUMD	45	33,33	74,07	Cukup Baik				
		<b>Capaian Sasaran 3</b>			<b>74,07</b>				
<b>Sasaran Strategis 4:</b>									
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel									
1	Peringkat LPPD Provinsi	Tinggi (skor 3,000)	Rendah (skor 1,9713)*	65,71	Cukup Baik				
		<b>Capaian Sasaran 4</b>			<b>65,71</b>				
<b>Sasaran Strategis 5:</b>									
Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur									
1	Percentase Perangkat Daerah yang telah tepat fungsi dan tepat ukur kelembagaannya	100% (31 PD dari 31 PD)	100% (31 PD dari 31 PD)	100	Baik				
		<b>Capaian Sasaran 5</b>			<b>100</b>				
<b>Sasaran Strategis 6:</b>									
Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau									
1	Nilai /Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	75 (Kategori BB)	68,57 (Kategori B)	91,43	Baik				

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status			
1	2	3	4	5	6			
	<b>Capaian Sasaran 6</b>			<b>91,43</b>	<b>Baik</b>			
<b>Sasaran Strategis 7:</b>								
Indeks Kepuasan Masyarakat								
1	Indeks Kepuasan Masyarakat atas Kinerja Pelayanan Publik Organisasi Perangkat Daerah di Provinsi Kepri	B	B	100	Baik			
	<b>Capaian Sasaran 7</b>			<b>100</b>	<b>Baik</b>			
<b>Sasaran Strategis 8:</b>								
Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan								
1	Persentase ketepatan waktu realisasi pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	87,00%	92,28%	106,069	Sangat Baik			
	<b>Capaian Sasaran 8</b>			<b>106,069</b>	<b>Sangat Baik</b>			
<b>Sasaran Strategis 9:</b>								
Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih								
1	Banyaknya Peraturan Produk Hukum Daerah yang dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan atau kesusilaan	7	19	271,429	Sangat Baik			
	<b>Capaian Sasaran 9</b>			<b>271,429</b>	<b>Sangat Baik</b>			
<b>Sasaran Strategis 10:</b>								
Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah								
1	Persentase pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah sesuai SOP	100%	100%	100	Baik			
	<b>Capaian Sasaran 10</b>			<b>100</b>	<b>Baik</b>			
<b>Sasaran Strategis 11:</b>								
Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah								
1	Persentase pelaksanaan pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai SOP	100%	100%	100	Baik			
	<b>Capaian Sasaran 11</b>			<b>100</b>	<b>Baik</b>			
<b>Sasaran Strategis 12:</b>								
Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan								

No.	Indikator	Target	Realisasi	Capaian (%)	Status
1	2	3	4	5	6
1	Persentase aset milik Sekretariat Daerah yang terjamin keamanannya	100%	100%	100	Baik
<b>Capaian Sasaran 12</b>				<b>100</b>	<b>Baik</b>
<b>Sasaran Strategis 13:</b>					
Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan					
1	Persentase Mubaligh yang tersertifikasi	100% (600 orang)	100%	100	Baik
2	Persentase santri yang menjadi hafiz	100% (5000 orang)	25% (1.250 orang)	25	Kurang Baik
<b>Capaian Sasaran 13</b>				<b>62,5</b>	<b>Cukup Baik</b>
<b>Sasaran Strategis 14:</b>					
Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan					
1	Persentase media massa yang menyiarkan kegiatan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah	100%	100%	100	Baik
<b>Capaian Sasaran 14</b>				<b>100</b>	<b>Baik</b>

**LAMPIRAN E**  
**TINGKAT EFEKTIVITAS**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN 2021**

No.	Program/ Sasaran Strategis	Serapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efektifitas
1	2	3	4	5
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi</b>			
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	92.78	100	7.22
2	Meningkatnya kualitas pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Daerah	83.48	100	16.52
3	Terkelola dan terpeliharanya aset milik Sekretariat Daerah secara tertib dan transparan	96.43	100	3.57
4	Meningkatnya akses pelayanan umum dan informasi penyelenggaraan pemerintahan	99.71	100	0.29
2	<b>Program Kebijakan Administrasi Pembangunan</b>			
1	Meningkatnya capaian penyerapan realisasi keuangan dan fisik kegiatan APBD dan APBN	86.24	95,39	9,15
3	<b>Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah</b>			
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan otonomi daerah yang akuntabel	99.23	65,71	-33,52
4	<b>Program Perekonomian dan Pembangunan</b>			

No.	Program/ Sasaran Strategis		Serapan Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efektifitas
1	2		3	4	5
	1	Meningkatnya rekomendasi bidang ekonomi yang ditindaklanjuti	94.29	100	5.71
	2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan BUMD	98.07	74.07	-24.00
5	<b>Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>				
	1	Tersedianya produk hukum provinsi yang tidak tumpang tindih	75.36	271.42	196.06
6	<b>Program Kesejahteraan Rakyat</b>				
	1	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan	98.63	62.5	-36.13
7	<b>Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa</b>				
	1	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Prinsip-Prinsip Pengadaan	76.35	106.07	29.72
8	<b>Program Penataan Organisasi</b>				
	1	Terwujudnya Organisasi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang tepat fungsi dan tepat ukur	99.48	100	0.52
	2	Meningkatnya Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Provinsi Kepulauan Riau	98.30	91,43	-6,87
	3	Indeks Kepuasan Masyarakat	98.66	100	1.34
<b>Jumlah</b>		<b>95.40</b>	<b>104,76</b>	<b>12,11</b>	